



2025 LKJIP SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kartini Nomor 2 Tuban, Jawa Timur 62311

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan wujud komitmen Sekretariat Daerah dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran..

LKjIP Sekretariat Daerah disusun berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan, meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, serta Rencana Kinerja Tahunan. Laporan ini memuat informasi mengenai capaian kinerja, analisis keberhasilan dan kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan bagi pimpinan serta pemangku kepentingan terkait.

Akhir kata, kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah. Semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.



Tuban, Februari 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban

Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19671005 199202 1 004

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel, setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi SAKIP tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah. Oleh karena itu, kinerja Sekretariat Daerah perlu diukur, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara sistematis melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Sekretariat Daerah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja, khususnya yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (Renja), dan Perjanjian Kinerja. Laporan ini menyajikan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) serta analisis terhadap keberhasilan dan kendala yang dihadapi selama periode pelaporan.

Selain sebagai wujud akuntabilitas kepada kepala daerah dan masyarakat, LKjIP juga menjadi instrumen evaluasi internal untuk mengidentifikasi permasalahan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, serta sebagai bahan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan demikian, penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja secara berkelanjutan.

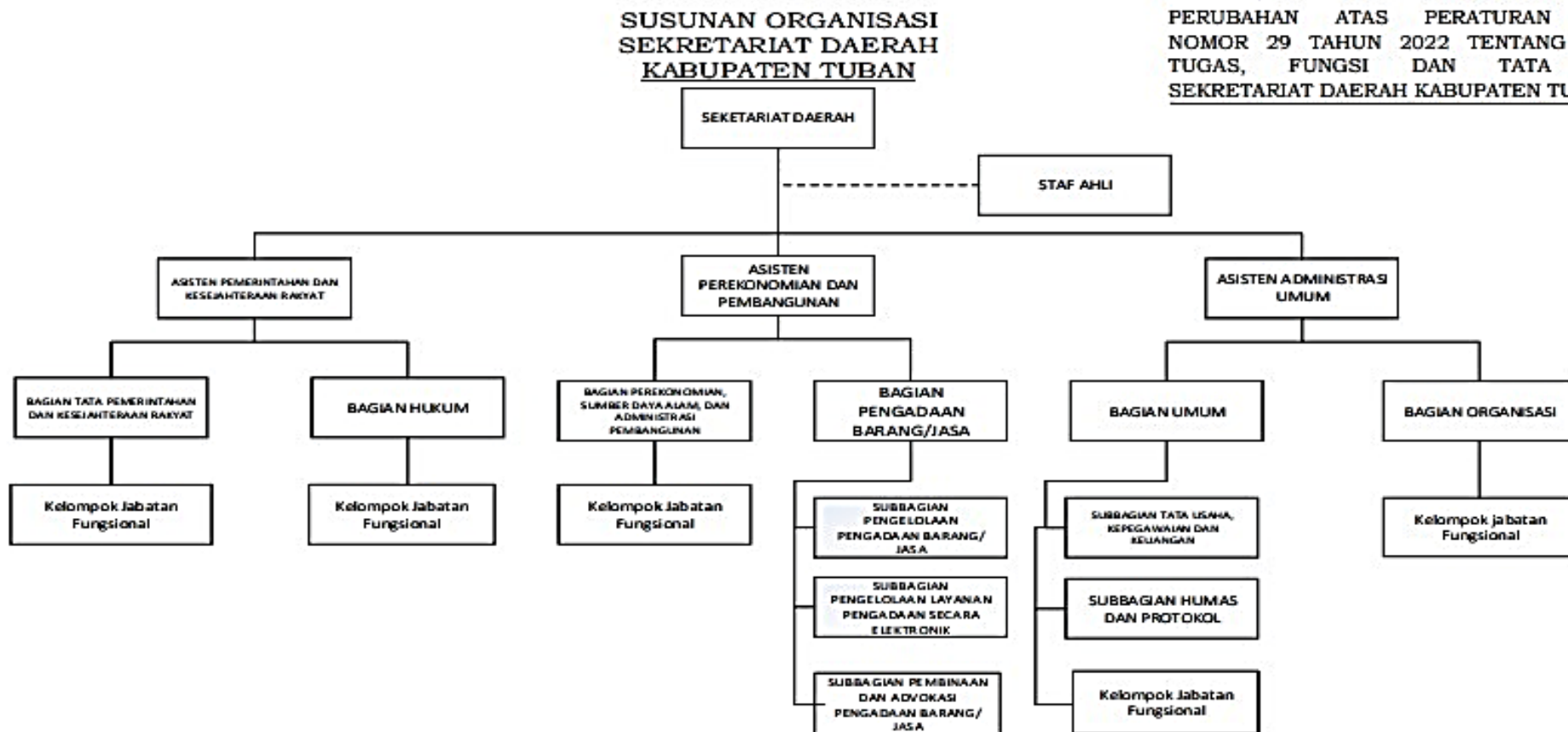
1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Adapun susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :
Sekretaris Daerah membawahkan dan mengoordinasikan:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan dan mengoordinasikan:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - b. Bagian Hukum.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan dan mengoordinasikan:
 - a. Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam; dan Administrasi Pembangunan
 - b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa membawahkan dan mengoordinasikan :
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
3. Asisten Administrasi Umum membawahkan dan mengoordinasikan:
 - a. Bagian Umum membawahkan dan mengoordinasikan:
 - a) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan;
 - b) Subbagian Humas dan Protokol; dan
 - b. Bagian Organisasi
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG URAIAN
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN



BUPATI TUBAN,

ttd

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Tahun 2026

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut:

Tabel 1
Kondisi Kepegawaian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Berdasarkan Unit Kerja Dan Jenis Kelamin Tahun 2026

No.	Unit Kerja	Jumlah PNS	PNS		Jumlah PPPK	PPPK		Jumlah PPPK Paruh Waktu	Non ASN	
			L	P		L	P		L	P
1.	Bagian Organisasi	8	2	6	3	1	2	0	0	0
2.	Bagian Umum	65	47	18	14	7	7	5	4	1
3.	Bagian Tapem dan Kesra	10	6	4	2	1	1	1	1	0
4.	Bagian Hukum	10	3	7	6	4	2	1	0	1
5.	Bagian Perekonomian, SDA dan AP	9	6	3	3	0	3	0	0	0
6.	Bagian PBJ	14	7	7	7	1	6	1	1	0

Sumber Data: Bagian Umum Tahun 2026

Tabel 2
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah	1 orang
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1 orang
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1 orang
4.	Asisten Administrasi Umum	1 orang
5.	Staff Ahli	2 orang
6.	Kepala Bagian	3 orang
7.	Kepala Sub. Bagian	2 orang
8.	Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana	140 orang

Sumber Data: Bagian Umum Tahun 2026

Tabel 3

Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IX	27 orang
2.	Golongan VII	4 orang
3.	Golongan V	13 orang
4.	Golongan IV	11 orang
5.	Golongan III	76 orang
6.	Golongan II	29 orang
7.	Golongan I	0 orang

Sumber Data: Bagian Umum Tahun 2026

Tabel 4

Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S3	1 orang
2.	S2	8 orang
3.	S1/DIV	84 orang
4.	DIII	15 orang
5.	SLTA	51 orang
6.	SLTP	1 orang
7.	SD	0 orang

Sumber Data: Bagian Umum Tahun 2026

B. Tugas dan Fungsi**1. Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban mempunyai tugas “Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.”

2. Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban
Sekretariat melaksanakan Tugas dan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - c. Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan asn pada instansi daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihasapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah (PD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, program kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5
Permasalahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya kapasitas birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima berbasis teknologi dan informasi	Belum optimalnya kapasitas Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan rancangan kebijakan daerah	Belum maksimalnya perumusan proses bisnis antar perangkat daerah
			Masih kurangnya kapasitas analisis dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

1. Informasi terkait program dan kegiatan Setda belum tersampaikan secara luas dan jelas;
2. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel;
3. Tindak lanjut hasil evaluasi belum optimal dalam perbaikan pelaksanaan program berikutnya;
4. Tata kelola administrasi pertanahan belum optimal;
5. Penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan yang di atasnya;
6. Kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum masih perlu ditingkatkan;
7. Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan potensi daerah yang terbaru;
8. Keterbatasan sumber daya (modal, SDM) dalam pelaksanaan

- pembangunan daerah;
9. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan;
 10. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengendalian program belum maksimal;
 11. Standar Operasional Prosedur (SOP) belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan secara konsisten.
 12. Penyelenggaraan pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf Ahli Bupati;
 13. Kompetensi SDM perlu ditingkatkan;
 14. Proses surat-menyurat, disposisi, dan pengarsipan masih banyak dilakukan secara manual sehingga memperlambat pelayanan

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Kesiapan dokumen pendukung (KAK, RAB, TOR) belum optimal pada awal tahun anggaran;
2. Kurangnya forum koordinasi teknis rutin dalam mendukung pelaksanaan program;
3. Keterbatasan pegawai teknis yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan kegiatan;
4. Ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan;
5. Pelayanan masyarakat di bidang pertanahan perlu dijamin oleh pemerintah;
6. Peningkatan kualitas SDM perancang produk hukum daerah yang belum optimal;
7. Masih banyak peraturan perundang-undangan di daerah yang pengaturannya tumpang tindih dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;
8. Masih terbatas kepada penyajian Laporan kinerja ruang lingkup Administrasi kegiatan dan anggaran;
9. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal;
10. Belum semua Perangkat Daerah memahami mekanisme kerjasama daerah;
11. Sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat kurang optimal;
12. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas

Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban antara lain:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan koordinasi belum sepenuhnya disusun atau diperbarui;
2. Proses kerja masih berorientasi pada administrasi, belum sepenuhnya pada hasil dan pelayanan;
3. Pengendalian dan evaluasi internal belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan;
4. Tingkat pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Setda masih bervariasi;
5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan dan koordinasi OPD masih terbatas;
6. Budaya kerja kolaboratif dan responsif belum terbentuk secara optimal

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban adalah:

1. Perubahan regulasi pusat yang cepat dan dinamis berdampak pada penyesuaian kebijakan daerah;
2. Perubahan arah kebijakan kepala daerah berdampak pada prioritas program dan kegiatan;
3. Tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan kualitas pelayanan publik semakin meningkat;
4. Koordinasi dengan instansi vertikal, BUMD, dan pihak swasta belum sepenuhnya efektif;
5. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut adaptasi sistem kerja dan pelayanan.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban dalam kurun waktu 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Restrukturisasi organisasi dan manajemen publik
4. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah
5. Manajemen keuangan dan aset daerah

Adapun penjabaran secara umum 5 (lima) isu-isu strategis Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Birokrasi pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, system pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut. Standar pelayanan (SPM, SPP,

SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

3. Restrukturisasi organisasi dan manajemen publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan yang “ramping, struktur, kaya fungsi”. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai *stakeholder*, pemerintah daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*.

4. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah

Tuntutan warga Kabupaten terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang

lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah kabupaten dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

5. Manajemen keuangan dan aset daerah

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana masyarakat (*public fund*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;

12. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban;
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2025. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian tujuan dan akan menjadi komitmen bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban untuk mencapainya dalam Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

2.1.1 Renstra Tahun 2021 – 2026

A. Visi Misi

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, Adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Bupati 2021-2026 adalah sebanyak 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut:

- Tujuan Misi 1 : Terwujudnya utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis.

Sasaran : Terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama

- Tujuan Misi 4:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah

Sasaran :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- Meningkatnya kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan satuan kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam penyusunan pedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021, sehingga Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021- 2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu lima tahunan.

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

Oleh karena itu, dengan memperhatikan Visi Bupati Tuban yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yaitu : “Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan”, Sekretariat Daerah menetapkan Sasaran dan Tujuan untuk periode tahun 2021-2026 yang bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis		Indeks toleransi/kerukunan hidup	Nilai	89,5	90,26	92,03	91,81	92,59
a		Terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama	Jumlah kebijakan yang berpihak kepada kerukunan hidup antar umat beragama	Angka	28	30	31	32	33
			Persentase kebijakan yang selaras	%	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah		Nilai SAKIP Daerah	Nilai	72,49	74,24	76,28	82,13	80,15
b		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai AKIP	Nilai	72,49	74,24	76,28	82,13	80,15
3	Meningkatnya kemandirian		Tingkat kemandirian	Poin	0,2349	0,2426	0,2503	0,2580	0,2657

	fiskal		fiskal pemerintah daerah						
c		Meningkatnya Kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD	Persentase peningkatan kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD	%	0,75	0,85	0,95	1,05	1,15

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Setda dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU Setda disusun sebagai perwujudan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas kinerja, efektivitas birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan kepada kepala daerah dan perangkat daerah lainnya.

Sebagai unsur staf yang memiliki peran koordinatif, Setda bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pembinaan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, IKU Setda dirancang agar selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, serta mendukung pencapaian kinerja kepala daerah secara keseluruhan. Indikator-indikator tersebut mencerminkan output dan outcome utama dari pelaksanaan fungsi manajerial, koordinatif, dan fasilitatif Setda.

Penyusunan dan penerapan IKU Setda juga menjadi instrumen penting dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Melalui IKU yang terukur, relevan, dan berorientasi hasil, Setda diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan, mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta memperkuat budaya kinerja di lingkungan pemerintah daerah.

Tabel 7
Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda Kabupaten Tuban 2021-2026

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama	1. Jumlah kebijakan yang berpihak kepada kerukunan antar umat beragama	Indeks dibentuk dari toleransi kesetaraan dan kerjasama, indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan, kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
		2. Persentase kebijakan yang selaras	Jumlah kebijakan yang selaras dalam satu tahun (n) dibagi jumlah keseluruhan kebijakan yang dikeluarkan dalam satu tahun (n) dikali 100%	Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda

2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	3. Nilai AKIP	Nilai evaluasi AKIP dari Kemenpan RB	Kemenpan RB	Bagian Organisasi Setda
3.	Meningkatnya kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD	4. Persentase peningkatan kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD	$\left(\frac{\text{Kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD tahun } n - \text{kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD tahun } n-1}{\text{kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD tahun } n-1} \right) \times 100\%$	Bagian Perekonomian, SDA, dan AP	Bagian Perekonomian, SDA, dan AP

2.1.2 Renstra Tahun 2025 – 2029**A. Visi Misi**

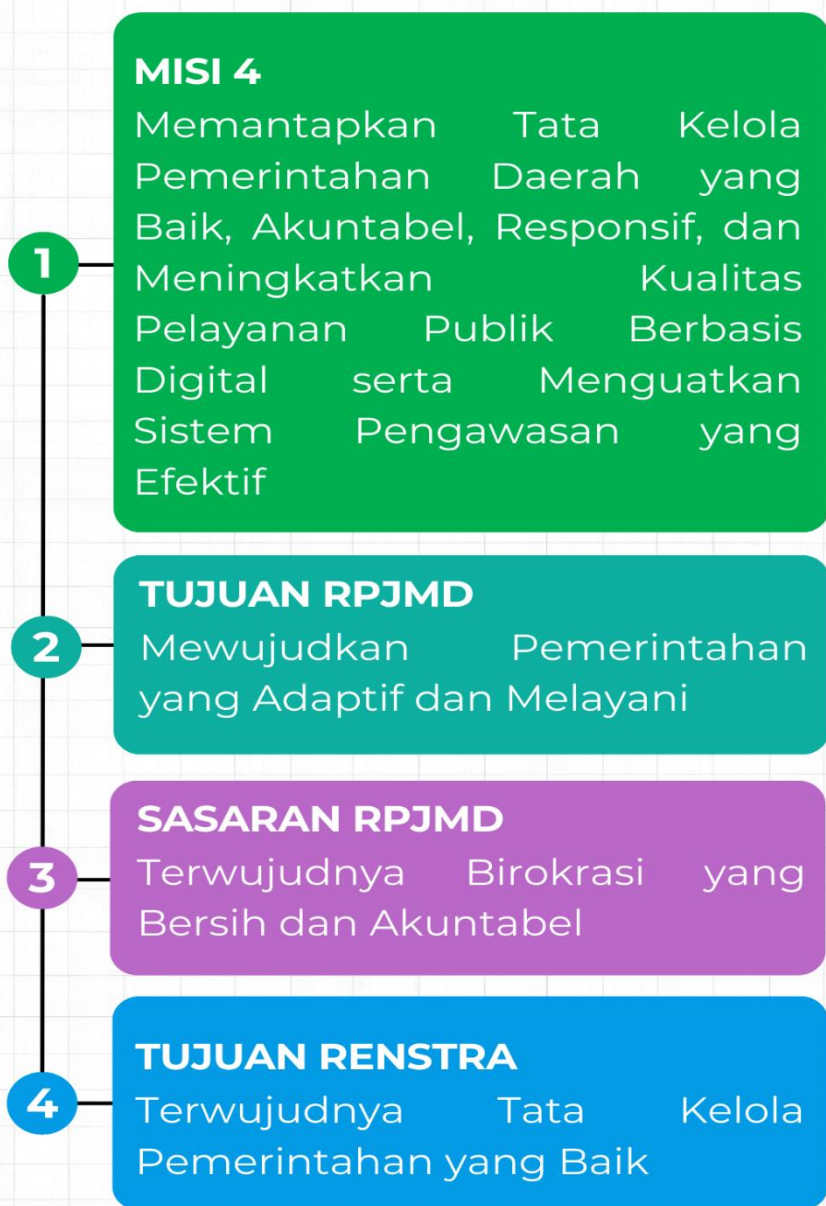
Sejalan dengan Visi Kabupaten Tuban yaitu “Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan”, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi tersebut menekankan pentingnya pembangunan yang merata, kolaboratif, inovatif, serta berkelanjutan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban.

Dalam konteks tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban berkontribusi langsung pada Misi ke-4, yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif.” Melalui penguatan koordinasi perangkat daerah, peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengawasan internal yang terintegrasi, Sekretariat Daerah berupaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Selain itu, implementasi visi dan misi Kabupaten Tuban tersebut diwujudkan melalui perumusan sasaran strategis dan program kerja Sekretariat Daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Setda berperan sebagai motor penggerak koordinasi kebijakan, fasilitator sinergi antar perangkat daerah, serta penguat kualitas pengambilan keputusan pimpinan daerah agar berjalan efektif, inovatif, dan kolaboratif. Dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta pengawasan yang berkesinambungan, Sekretariat Daerah diharapkan mampu memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan transparan, responsif, dan berorientasi pada hasil, sehingga secara nyata mendukung terwujudnya Tuban yang sejahtera, berkeadilan, berbudaya, dan berkelanjutan.

Dukungan pencapaian misi RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana berikut:

KETERKAITAN VISI MISI TERHADAP RENSTRA SETDA



B. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dirumuskan sebagai bagian integral dari upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tuban sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perumusan tujuan dan sasaran tersebut menjadi landasan strategis bagi Sekretariat Daerah dalam melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administratif pemerintahan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Seiring dengan dimulainya periode perencanaan menengah yang baru, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tuban serta mempertimbangkan dinamika kebutuhan organisasi, tantangan tata kelola pemerintahan, dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra 2025–2029 mencerminkan arah kebijakan yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis.

Tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029 selanjutnya dijabarkan ke dalam indikator kinerja yang terukur dan menjadi dasar penyusunan perencanaan tahunan, penganggaran, serta pelaporan kinerja melalui LKjIP. Melalui keterpaduan antara perencanaan menengah dan perencanaan tahunan tersebut, Sekretariat Daerah diharapkan mampu menjaga konsistensi pencapaian kinerja, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Tuban secara berkelanjutan. Tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Persentase Indikator Rincian Indeks RB General yang Berkategori Minimal Baik	%	84,21	89,47	94,74	100	100	100
a		Meningkatnya Akses Keuangan	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,08	4,11	4,14	4,17	4,19	4,21

		Daerah								
b		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	67,50	70	72,50	75	77,5	80
c		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Angka	88,7	89,4	90,1	90,8	91,3	91,8

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban merupakan ukuran keberhasilan kinerja organisasi yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. IKU ini disusun berdasarkan tujuan dan sasaran perangkat daerah serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagai dasar pengukuran kinerja yang terarah dan terukur.

Melalui IKU, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara periodik untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja organisasi. Capaian IKU menggambarkan sejauh mana peran Sekretariat Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pelayanan administrasi pemerintahan, serta dukungan manajerial kepada kepala daerah.

Penyajian IKU dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas kinerja kepada pemangku kepentingan serta sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja di masa mendatang. Dengan pengukuran IKU yang jelas dan berkesinambungan, diharapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Tabel 10
Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda Kabupaten Tuban 2025-2029

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akses Keuangan Daerah	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks Akses Keuangan Daerah adalah indikator yang mengukur tingkat kemudahan dan keterjangkauan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan formal di suatu daerah. Indeks ini mencerminkan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan layanan keuangan dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.	Otoritas Jasa Keuangan	Bagian Perekonomian, SDA dan AP
2.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur mutu kebijakan pemerintah berdasarkan proses perumusan,	Lembaga Administrasi Negara	Bagian Hukum dan Bagian Organisasi

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
			implementasi, dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana kebijakan disusun secara berbasis data, partisipatif, efektif, dan berkelanjutan.		
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah adalah indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah. IKM mencerminkan penilaian masyarakat atas aspek pelayanan seperti prosedur, waktu layanan, biaya, dan sikap petugas.	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi Setda

D. Keterkaitan dengan Periode Sebelumnya

- Indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) pada periode perencanaan ini diselaraskan dengan indikator pada periode sebelumnya yang berfokus pada peningkatan kontribusi BLUD dan BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan akses keuangan daerah mendorong penguatan kinerja dan keberlanjutan BLUD dan BUMD melalui kemudahan pembiayaan, perluasan layanan keuangan, serta pengelolaan keuangan yang lebih inklusif dan efisien. Dengan demikian, peningkatan nilai IKAD diharapkan berkontribusi secara tidak langsung namun strategis terhadap peningkatan peran BLUD dan BUMD dalam mendukung PAD, sehingga kesinambungan arah kebijakan dan tujuan pembangunan daerah antarperiode tetap terjaga.
- Indeks Kualitas Kebijakan memiliki keterkaitan yang erat dengan indikator jumlah kebijakan yang berpihak kepada kerukunan hidup antar umat beragama serta persentase kebijakan yang selaras. IKK mengukur sejauh mana kebijakan disusun secara partisipatif, berbasis bukti, responsif, dan tidak diskriminatif. Kebijakan yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut cenderung mendukung terciptanya kerukunan antar umat beragama. Oleh karena itu, peningkatan jumlah kebijakan yang berpihak pada kerukunan serta tingginya persentase kebijakan yang selaras secara langsung mencerminkan peningkatan kualitas kebijakan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap nilai Indeks Kualitas Kebijakan.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai AKIP daerah, karena IKM merupakan salah satu indikator outcome yang mencerminkan kualitas pelayanan publik dan kinerja perangkat daerah. Peningkatan IKM menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja telah berjalan efektif dan berorientasi pada hasil, yang merupakan prinsip utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kinerja pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat akan memperkuat ketercapaian sasaran strategis perangkat daerah, sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan

nilai AKIP daerah.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

2.2.1 PK Tahun 2025 (Sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban pada Tahun 2025 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Tuban untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Tabel 11
Lampiran Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama	1. Jumlah kebijakan yang berpihak kepada kerukunan hidup antar umat beragama	32 Kebijakan
		2. Persentase Kebijakan yang selaras	100%
2	Meningkatnya Kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD	3. Presentase peningkatan kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD	1,05%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaran pemerintah daerah	4. Nilai AKIP Kabupaten	82,13 Nilai

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 39.866.332.920	APBD
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.587.105.830	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 47.958.202.584	APBD
	JUMLAH	Rp 89.411.641.334	

2.2.2 Review/Perubahan PK Tahun 2025 (Sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029)

Review dan perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban dilakukan sebagai tindak lanjut penetapan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja tahunan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra terbaru. Selain itu, review PK juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya guna menjaga kesinambungan dan peningkatan capaian kinerja organisasi.

Perubahan PK Tahun 2025 difokuskan pada penyempurnaan indikator kinerja agar lebih relevan, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome), sehingga mampu merefleksikan kinerja nyata Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan disusunnya PK yang selaras dengan Renstra 2025–2029, diharapkan pelaksanaan kinerja tahun 2025 dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel, serta menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Tabel 12
Lampiran Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akses Keuangan Daerah	1. Indeks Akses Keuangan Daerah	4,08 Angka
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	2. Indeks Kualitas Kebijakan	67,50 Angka
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,7 Angka

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 38.467.447.515	P APBD
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.242.722.417	P APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 49.116.374.346	P APBD
	JUMLAH	Rp 88.826.544.278	

2.2.3 Ringkasan Perubahan PK Tahun 2025

Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban dilakukan karena adanya penetapan Rencana Strategis (Renstra) terbaru Tahun 2025–2029, yang menggantikan Renstra sebelumnya Tahun 2021–2026 yang digunakan pada tahap awal perencanaan. PK awal Tahun 2025 disusun berdasarkan sasaran, indikator, dan target kinerja dalam Renstra 2021–2026, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan arah kebijakan, fokus pembangunan, serta penajaman peran Sekretariat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra terbaru.

Melalui perubahan PK Tahun 2025, dilakukan penyesuaian terhadap sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja agar selaras dengan Renstra 2025–2029. Penyesuaian ini mencakup penyederhanaan dan penajaman indikator, pergeseran fokus kinerja menuju capaian outcome, serta penguatan keterkaitan antara kinerja perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, PK hasil perubahan diharapkan lebih relevan, terukur, dan akuntabel, serta menjadi dasar yang lebih tepat dalam pelaksanaan kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Tabel 13
Ringkasan Perubahan PK Tahun 2025

PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026)			REVIEW/PERUBAHAN PK (Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029)			KETERANGAN
No	Sasaran	Indikator	No	Sasaran	Indikator	
1.	Terwujudnya Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama	Jumlah kebijakan yang berpihak kepada kerukunan hidup antar umat beragama	1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Sasaran dan Indikator Berubah
		Persentase Kebijakan yang selaras				
2.	Meningkatnya Kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD	Persentase peningkatan kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD	2.	Meningkatnya Akses Keuangan Daerah	Indeks Akses Keuangan Daerah	Sasaran dan Indikator Berubah
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai AKIP Kabupaten	3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Sasaran dan Indikator Berubah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja organisasi Sekretariat Daerah menunjukkan hasil yang positif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun pelaporan. Pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan berpedoman pada Rencana Strategis yang berlaku. Secara umum, sebagian besar indikator kinerja utama dan indikator pendukung dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja organisasi.

Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh koordinasi yang semakin baik antar perangkat daerah, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta optimalisasi peran Sekretariat Daerah sebagai koordinator perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi pemerintahan. Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan, antara lain melalui penguatan sistem pengendalian kinerja, peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik, serta pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Hasil capaian ini juga menunjukkan adanya peningkatan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Penilaian ini untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Berikut tabel capaian kinerja Sekretariat Daerah s/d Tribulan III :

Tabel 14
Capaian Kinerja Tahun 2025 s/d Triwulan III

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama	Jumlah kebijakan yang berpihak kepada kerukunan hidup antar umat beragama	32 Kebijakan	38.467.447.515	3 Kebijakan	25.153.887.618		
	Persentase kebijakan yang selaras	100%		100%			
Terwujudnya kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang efektif	Jumlah rancangan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	32 Kebijakan	38.467.447.515	0 Kebijakan	25.153.887.618	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	prosentase rancangan	96,6%		100%			

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
	kebijakan yg ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah						
Meningkatnya Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Rancangan kebijakan di bidang Kewilayahan otonomi daerah dan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah	100%	1.194.050.693	100%	535.668.199	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	
Terwujudnya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penatacaan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	91.714.812	2 Dokumen	30.609.000	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	- Menyusun perencanaan rapat koordinasi pejabat Daerah

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
							- Melaksaksakana rapat Koordinasi Pejabat Daerah - Menyiapkan bahan rapat Koordinasi pejabat Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	533.832.225	0 Dokumen	409.877.500	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	- Mengecek Kegiatan Fasilitasi Tanah - Menyusun Dokumen Kegiatan Fasilitasi Perencanaan, Pelaksanaan Pelaporan Dan Evaluasi Dana Kelurahan Sesuai Ketentuan - Melaksanakan

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dengan Lancar dan Sesuai Prosedur - Menyusun Dokumen Kebijakan Daerah tentang Batas Desa Sesuai Ketentuan - Menyusun Dokumen mutakhir Kode Dan Data Wilayah Administrasi Kecamatan, Kelurahan Dan Desa Sesuai Ketentuan yang berlaku - Mengiput Data

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Penyelenggaraan Nama Rupabumi Sesuai Ketentuan Dan Prosedur - Melaksanakan Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Sesuai Ketentuan Dan Prosedur - Menyusun Dokumen Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sesuai Ketentuan Dan Prosedur - Melaksanakan

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa Sesuai Ketentuan Dan Prosedur fasilitasi Tukar Menukar tanah kas Desa sesuai ketentuan dan Prosedur
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	568.503.656	3 Dokumen	95.181.699	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	- Mengecek Dokumen LKPJ Per urusan - Menyusun data-data dari OPD untuk Bahan Penyusunan Buku LKPJ, LPPD , dan SPM - Membuat laporan

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Pertanggung Jawaban Keterangan Bupati setiap Tahun - Menginput indikator kinerja kunci 110 IKK LPPD - Membuat MOU dengan OPD lain dan Pihak Luar Pemda
Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase kegiatan keagamaan dan kesra yang terlaksana dengan baik	87%	34.827.115.514	4,35%	23.333.715.995	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
Terwujudnya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental	14 Dokumen	8.391.136.470	11 Dokumen	6.476.863.495	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan bina Mental Spiritual	- Peringatan Hari Santri - Peringatan Hari Besar Keagamaan

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Spiritual						(PHBA) - Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha - Pengajian Umum - Silaturahmi Jemaah Calon Haji ASN Kabupaten Tuban - Koordinasi Bina Mental Spiritual - Mengikuti Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Jatim dan MQK
Terlaksananya Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang	7 Dokumen	3.542.625.0041	1 Dokumen	3.526.075.00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Sosial	Penguatan Sektap UKS

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB						
Terlaksananya Kebijakan Evaluasi dan Capaian	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan	14 Dokumen	22.893.354.040	10 Dokumen	13.330.777.500	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian	Insentif guru TPQ

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas					Kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	
Terwujudnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah penyusunan produk hukum dan peningkatan kesadaran hukum melalui publikasi	339 Dokumen	2.446.281.308	222 Dokumen	1.284.503.424	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan pelayanan hukum						
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	230 Dokumen	837.277.204	193 Dokumen	647.927.589	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	- Fasilitasi Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah - Menghimpun usulan Perda dan Perkada dari perangkat daerah - Melakukan harmonisasi agar rancangan produk hukum tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan	4 Kasus	798.280.184	6 Kasus	192.106.600	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	- Fasilitasi Pendampingan Hukum bagi

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi Bantuan Hukum						Pemerintah Daerah - Koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya - Fasilitasi penanganan gugatan, tuntutan, dan sengketa hukum yang melibatkan pemerintah daerah
Meningkatnya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	245 Dokumen	810.723.920	225 Dokumen	444.469.235	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	- Menghimpun seluruh produk hukum daerah (Perda, Perkada, Keputusan Kepala Daerah) yang telah ditetapkan

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
							- Pengelolaan arsip fisik dan digital produk hukum daerah - Pengelolaan dan pemutakhiran JDIH Pemerintah Daerah
Meningkatnya Kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD	Presentase Peningkatan Kontribusi BLUD dan BUMD Terhadap PAD	1,05%	1.242.722.417	Belum Rilis	384.807.631		
Terwujudnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang optimal	Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan perekonomian dan sumber daya alam	88,5%	1.242.722.417	83,33%	384.807.631	Program Perekonomian dan Pembangunan	
	Persentase rumusan dan	95%		75%			

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
	fasilitasi kebijakan administrasi pembangunan						
Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan yang selesai diproses melalui UKPBJ	92%	548.622.500	57%	193.117.219	Kegiatan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	
Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	185.300.000	3 Dokumen	102.133.856	Sub Kegiatan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	- Fasilitasi Proses PBJ - Pengelolaan Katalog Elektronik
Terwujudnya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	186.585.000	0 Dokumen	59.275.104	Sub Kegiatan Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	- Pengelolaan SPSE - Layanan Konsultasi Penyedia dan Non Penyedia pada SPSE
Terwujudnya Pembinaan dan Advokasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan	200 Orang	176.737.500	178 Orang	31.708.259	Sub Kegiatan Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	- Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengadaan Barang dan Jasa	Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						Barang/Jasa - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Jumlah koordinasi dan fasilitasi kebijakan perekonomian	63 Kali	416.848.300	45 Kali	90.779.500	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	190.070.925	0 Dokumen	41.004.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	- Sosialisasi pembinaan BLUD dan BUMD - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BLUD dan BUMD - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Fasilitasi Pengelolaan BLUD dan BUMD

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	189.660.375	0 Laporan	39.278.500	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	- Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) - Monitoring dan Evaluasi Harga dan Ketersediaan Bapokting - Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah - Menyusun Laporan Kegiatan TPID
Terwujudnya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	37.117.000	0 Dokumen	10.497.000	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	- Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Percepatan Akses Keuangan Daerah

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah koordinasi dan fasilitasi kebijakan sumber daya alam	55 Kali	191.842.780	47 Kali	722.458.652	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
Tercapainya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	85.238.140			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Tercapainya	Jumlah Dokumen	1	64.269.000			Sub Kegiatan Koordinasi,	Koordinasi,

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen				Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Tercapainya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan	1 Dokumen	42.335.640	0 Dokumen	22.951.675	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan						
Terlaksananya Administrasi Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan tepat waktu dan lengkap	92%	85.408.837	77,5%	28.452.260	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
Terwujudnya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	22.443.950	0 Dokumen	10.881.250	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Permasalahan dalam Percepatan Program Pembangunan

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	40.041.262	3 Laporan	5.583.750	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pembangunan
Terwujudnya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	22.923.625	9 Laporan	11.987.260	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pembangunan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai AKIP	82,13 Nilai	49.116.374.346	81,27 Nilai	23.122.937.554		
Meningkatnya Nilai	Nilai AKIP	83,05	49.116.374.346	0 Poin	23.122.937.554	Program Penunjang	Penguatan dan

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
AKIP Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Poin				Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	implementasi sakip pada perangkat daerah, Penginputan data pada aplikasi simanis dan esr
Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	9 Dokumen	122.043.559	8 Dokumen	91.252.090	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen laporan evaluasi sekretariat daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	94.953.634	2 Dokumen	70.270.265	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Renja, Renja Perubahan, Manajemen Risiko dan Rencana Aksi
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	27.089.925	4 Dokumen	20.981.825	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembuatan dokumen laporan antara lain, LKJIP, LKPJ, Laporan

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Kinerja Individu dan Dalev per tribulan
Terciptanya Penataan Organisasi	Tingkat Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat	83,05 Nilai	1.864.812.885	0 Nilai	645.513.049	Kegiatan Penataan Organisasi	- Penataan struktur organisasi - Pembinaan dan fasilitasi perangkat daerah
Meningkatnya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	409.336.300	1 Dokumen	165.321.490	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	- Penyusunan dokumen anjab, evjab dan skj - Pelaksanaan evaluasi kelembagaan - Penyusunan perbup tusi perangkat daerah
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	787.194.635	0 Dokumen	204.374.684	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	- Penilaian IKM - Pendampingan perangkat daerah persiapan penilaian Ombudsman dan IPP

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
							- Pembuatan dokumen ketatalaksanaan - penilaian IPP
Terciptanya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	522.522.675	0 Dokumen	156.564.875	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	- Koordinasi dan Pendampingan Kegiatan Sakip RB - Penyusunan dokumen kelengkapan penilaian Sakip RB - Penyusunan dokumen rencana aksi RB - Evaluasi tribulanan rencana aksi
Terciptanya Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan	1 Dokumen	145.759.275	1 Dokumen	119.252.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	- Penyusunan LKJIP kabupaten - Desk LKJIP

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					Daerah	Perangkat Daerah - Pengembangan aplikasi Simanisku
Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi Pegawai	13 Orang	12.688.000	0 Orang	0	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas untuk KDH/WKDH
Terciptanya Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan yang disediakan	1 Paket	12.688.000	0 Paket	0	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas untuk KDH/WKDH
Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	4 Dokumen	20.851.460.161	3 Dokumen	12.589.543.785	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima	140 Orang	20.640.637.161	141 Orang	12.461.697.785	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN setiap

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
ASN	Gaji dan Tunjangan ASN						bulan
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	205.612.500	9 Dokumen	122.671.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	5.210.500	2 Dokumen	5.175.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan laporan keuangan
Terciptanya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
Terciptanya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen		Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan laporan keuangan prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	8 Layanan	4.399.405.358	8 Layanan	1.922.077.758	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	97.028.716	2 Paket	52.253.700	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	2 Paket	150.874.100	1 Paket	88.807.535	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
Kantor	Kantor yang Disediakan						
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	136.142.400	2 Paket	46.794.973	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.764.586.500	1 Paket	1.323.671.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	529.417.0752	2 Paket	73.273.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	8 Dokumen	92.469.000	8 Dokumen	61.840.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
Terciptanya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	276.087.567	2 Laporan	142.112.800	Sub Kegiatan . Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu
Tersedianyn Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	352.800.000	9 Laporan	133.324.750	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	6 Unit	2.130.890.135	6 Unit	343.079.741	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	1.191.000.000	0 Paket	0	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel
Terlaksananya Pengadaan Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Laporan	939.890.135	1 Laporan	343.079.741	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana	Pengadaan sarana dan prasarana

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan ³					pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang	7 Jasa	2.654.130.632	7 Jasa	1.555.148.668	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.000.000	9 Laporan	4.450.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Paket Pengiriman
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1.227.905.000	3 Laporan	747.617.371	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	59.994.216	3 Laporan	37.652.200	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.352.231.416	9 2Laporan	765.429.097	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Agustusan
Terciptanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	238 Unit	9.305.733.306	183 Unit	3.243.189.085	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	149 Unit	184.000.0001	59 Unit	55.030.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Penyediaan Pajak Kendaraan

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Terciptanya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	274.276.444	45 Unit	56.380.500	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel
Terciptanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	205 Unit	1.311.333.899	85 Unit	520.182.189	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Terciptanya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	6.124.799.123	17 Unit	2.505.399.701	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
Terciptanya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1.411.323.840	8 Unit	106.196.695	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Tersusunnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dokumen administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH	4 Jenis	4.886.542.772	4 Jenis	1.659.045.291	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah	2 Orang	3.475.954.572	2 Orang	703.393.461	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan Wakil Kepala Daerah						
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	204.588.200	2 Paket	203.165.300	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	56.000.000	2 Orang	30.486.530	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang	2 Orang	1.150.000.000	2 Orang	722.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala	Penyediaan Dana Penunjang Operasional

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terwujudnya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH	48 Orang	513.731.000	36 Orang	304.471.600	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
Terpenuhinya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	513.731.000	2 Paket	304.471.600	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
Terwujudnya Tugas Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan keprotokoleran dan Pendampingan	150 Kegiatan	2.374.936.538	100 Kegiatan	769.616.487	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
Terlaksananya Fasilitas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas	12 Laporan	462.020.000	9 Laporan	178.500.625	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Fasilitas Keprotokolan

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (s/d TW III)	Realisasi Anggaran (s/d TW III)	Program/Kegiatan	Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
Keprotokolan	Keprotokolan						
Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	1.912.916.538	9 Laporan	591.115.862	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

B. Capaian Atas Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Seiring dengan ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029, telah dilakukan review dan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025. Review ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja tahunan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang terbaru.

Hasil review menunjukkan bahwa perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilakukan secara selektif dan substantif, terutama pada aspek penajaman sasaran strategis, penyelarasan indikator kinerja utama (IKU), serta penyesuaian target kinerja agar lebih terukur, relevan, dan mendukung pencapaian sasaran Renstra Tahun 2025–2029. Penyesuaian tersebut juga mempertimbangkan dinamika kebijakan nasional dan daerah, kapasitas organisasi, serta evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

3.1.1 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sekretariat Daerah pada tahun berjalan disusun untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Analisis ini menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengukur akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara umum, hasil perbandingan menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja Sekretariat Daerah mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi kinerja pada tahun berjalan berada pada kategori baik, yang mencerminkan konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam memberikan dukungan kebijakan, koordinasi, serta pelayanan administratif kepada kepala daerah dan perangkat daerah. Perbandingan target dan realisasi kinerja pada TW IV Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 15
Capaian Target dan Realisasi Kinerja TW IV Tahun 2025

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I	Sasaran : Meningkatnya Akses Keuangan Daerah	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	4,08	4,24	103,92	Tercapai
IA	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	89,01	86,46	97,14	Tidak Tercapai
		Persentase Realisasi Kontribusi BUMD terhadap PAD	1,06	0,96	90,57	Tidak Tercapai
IA.1	Kegiatan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Level/Tingkat Kematangan UKPBJ	40	40	100,00	Tercapai
		Nilai Skor Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	13,33	22,86	171,49	Tercapai
		Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	25,95	23,6	90,94	Tidak Tercapai
IA.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan	4	4	100,00	Tercapai

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Jasa	Barang dan Jasa				
IA.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	1	100,00	Tercapai
IA.1.3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200	200	100,00	Tercapai
IA.2	Kegiatan Penerapan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian	3	3	100,00	Tercapai
IA.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	2	100,00	Tercapai
IA.2.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	1	100,00	Tercapai
IA.2.3	Sub Kegiatan Perencanaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan	1	1	100,00	Tercapai

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				
IA.3	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah rumusan kebijakan bidang sumber daya alam	3	3	100,00	Tercapai
IA.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2	2	100,00	Tercapai
IA.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1	1	100,00	Tercapai

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
IA.3.3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	1	100,00	Tercapai
IA.4	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah laporan administrasi pembangunan yang tersusun sesuai dengan ketentuan	1	1	100,00	Tercapai
IA.4.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	1	100,00	Tercapai
IA.4.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	4	100,00	Tercapai
IA.4.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan	12	12	100,00	Tercapai

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Pelaksanaan Pembangunan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				
II	Sasaran Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	67,5	70,88	105,00	Tercapai
IIB	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rancangan Kebijakan yang Mendukung Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan Daerah	100	100	100,00	Tercapai
		Indeks Zakat Nasional (IZN)	0,758	0,75	98,94	Memakai data capaian tahun 2024 dikarenakan Data capaian 2025 belum rilis
		Persentase Perda yang Disahkan	100	100	100,00	Tercapai

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
IIB.1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Indikator Kunci	91	90	98,90	Memakai data capaian tahun 2024 dikarenakan Data capaian 2025 belum rilis
IIB.1.1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2	2	100,00	Tercapai
IIB.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5	5	100,00	Tercapai
IIB.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	4	100,00	Tercapai
IIB.2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana dengan baik	86,96	69,57	80,00	Tidak Tercapai
IIB.2.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina	12	12	100,00	Tercapai

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Spiritual	Mental Spiritual				
IIB.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	7	7	100,00	Tercapai
IIB.2.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum	14	14	100,00	Tercapai

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		Linmas				
IIB.3	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase kebijakan yang terbit sesuai dengan perencanaan	100	100	100,00	Tercapai
IIB.3.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	230	250	108,69	Tercapai
IIB.3.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4	10	250,00	Tercapai
IIB.3.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	226	289	127,87	Tercapai
III	Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,7	88,73	100,03	Tercapai

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
IIIC	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	83,05	83,05	100,00	Tercapai
		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja dalam SAKIP Daerah	11,72	12,20	104,09	Tercapai
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dalam SAKIP Daerah	24,01	23,74	98,87	Tidak Tercapai
IIIC.1	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase OPD yang menyusun laporan kinerja sesuai dengan ketentuan	100	100	100,00	Tercapai
		Nilai kematangan organisasi	47,1	46,2	98,08	Memakai data capaian tahun 2024 dikarenakan Data capaian 2025 belum rilis
		Persentase OPD yang memenuhi kepatuhan dalam persyaratan penilaian IPP	93,33	92,21	98,79	Tidak Tercapai

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja sesuai ketentuan	100	100	100,00	Tercapai
IIIC.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	2	100,00	Tercapai
IIIC.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	2	100,00	Tercapai
IIIC.1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	2	100,00	Tercapai
IIIC.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	1	100,00	Tercapai
IIIC.2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	9	9	100,00	Tercapai

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
IIIC.2.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100,00	Tercapai
IIIC.2.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja yang tersusun	7	7	100,00	Tercapai
IIIC.3	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Laporan keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9	9	100,00	Tercapai
IIIC.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan	140	140	100,00	Tercapai
IIIC.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100,00	Tercapai
IIIC.3.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	4	100,00	Tercapai

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
IIIC.3.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00	Tercapai
IIIC.3.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	23	23	100,00	Tercapai
IIIC.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	1	1	100,00	Tercapai
IIIC.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	13	13	100,00	Tercapai
IIIC.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi	5	5	100,00	Tercapai

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		Umum				
IIIC.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	100,00	Tercapai
IIIC.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	100,00	Tercapai
IIIC.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	100,00	Tercapai
IIIC.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100,00	Tercapai
IIIC.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100,00	Tercapai
IIIC.5.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	8	100,00	Tercapai

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
IIIC.5.7	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2	2	100,00	Tercapai
IIIC.5.8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00	Tercapai
IIIC.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	2	2	100,00	Tercapai
IIIC.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	3	100,00	Tercapai
IIIC.6.2	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	100,00	Tercapai
IIIC.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	4	4	100,00	Tercapai

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
IIIC.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100,00	Tercapai
IIIC.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00	Tercapai
IIIC.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	100,00	Tercapai
IIIC.7.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00	Tercapai
IIIC.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5	5	100,00	Tercapai
IIIC.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	149	149	100,00	Tercapai

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
IIIC.8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	50	100,00	Tercapai
IIIC.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	205	205	100,00	Tercapai
IIIC.8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24	24	100,00	Tercapai
IIC.8.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	10	100,00	Tercapai
IIIC.9	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala	Jumlah Jenis laporan administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH	4	4	100,00	Tercapai

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
IIIC.9.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	100,00	Tercapai
IIIC.9.2	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2	2	100,00	Tercapai
IIIC.9.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	100,00	Tercapai
IIIC.9.4	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	100,00	Tercapai
IIIC.10	Kegiatan Fasilitasi	Jumlah laporan fasilitasi	12	12	100,00	Tercapai

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	kerumahtanggaan sekretariat daerah				
IIIC.10.1	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala	2	2	100,00	Tercapai
IIIC.11	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah jenis laporan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	2	2	100,00	Tercapai
IIIC.11.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	12	100,00	Tercapai
IIIC.11.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	12	100,00	Tercapai

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah terdiri atas tiga indikator, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang mencerminkan kualitas proses perumusan dan implementasi kebijakan daerah, serta Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang menggambarkan tingkat kemudahan dan keterjangkauan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan daerah. Ketiga indikator tersebut menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan kebijakan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 4,08, realisasi yang dicapai adalah sebesar 4,24, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 103,92% atau melampaui target sebesar 0,16 poin. Capaian tersebut mencerminkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal di Kabupaten Tuban yang didukung melalui sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga jasa keuangan, perbankan, serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Keberhasilan melampaui target ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan inklusi keuangan daerah serta menjadi bukti bahwa upaya fasilitasi, koordinasi, dan penguatan kebijakan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akses keuangan masyarakat di Kabupaten Tuban.

Indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), dengan target yang ditetapkan sebesar 67,5, sedangkan realisasi capaian mencapai 70,88 atau sebesar 105,01%, sehingga menunjukkan bahwa kinerja telah tercapai dan melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan bahwa proses perumusan kebijakan daerah telah dilaksanakan secara optimal, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi kebijakan. Keberhasilan pencapaian nilai

IKK ini dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah, penerapan kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat, penguatan peran Sekretariat Daerah dalam pengendalian kualitas kebijakan, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang terlibat dalam penyusunan kebijakan. Faktor-faktor tersebut secara simultan berkontribusi terhadap terwujudnya kebijakan daerah yang lebih terarah, terukur, dan berkualitas.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah ditetapkan dengan target kinerja sebesar 88,7, dengan realisasi capaian sebesar 88,73, sehingga menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Daerah telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan bahwa pelayanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah telah berjalan secara optimal dan mampu memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Tercapainya nilai IKM ini didukung oleh konsistensi penerapan standar pelayanan, perbaikan berkelanjutan terhadap prosedur dan mekanisme layanan, peningkatan kompetensi serta profesionalisme aparatur, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan secara berkala, yang secara keseluruhan berdampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Secara umum, perbandingan realisasi dan capaian kinerja Sekretariat Daerah pada tahun berjalan dengan beberapa tahun sebelumnya menunjukkan gambaran perkembangan kinerja organisasi dari waktu ke waktu sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkesinambungan. Tren capaian kinerja ini memberikan indikasi tentang konsistensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Setda dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut tabel perbandingan realisasi IKU dalam beberapa tahun terakhir :

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Kinerja Utama Tahun 2022 – 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun				Keterangan
		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	3,74	3,71	4,03	4,24	
2.	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Belum Ada Penilaian IKK	65,00	Tidak Mengikuti Penilaian	70,88	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Belum Mengikuti Penilaian	Belum Mengikuti Penilaian	88,00	88,73	

Indikator IKAD menunjukkan tren peningkatan yang relatif konsisten selama periode pengukuran. Pada tahun 2022 nilai IKAD tercatat sebesar 3,74, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 3,71. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 4,03, yang mengindikasikan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap layanan keuangan daerah. Untuk tahun 2025, nilai IKAD sebesar 4,24 yang menunjukkan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tren peningkatan hingga 2024 mencerminkan upaya perbaikan yang mulai menunjukkan hasil positif.

Grafik 1
Perkembangan Nilai Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)



Capaian Indeks Kualitas Kebijakan menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Pada tahun 2022 belum tersedia penilaian IKK, sehingga belum dapat dilakukan pengukuran kinerja. Tahun 2023 menjadi tahun awal pengukuran dengan nilai 65,00 yang mencerminkan kualitas kebijakan pada tingkat cukup. Namun pada tahun 2024, indikator ini tidak mengikuti penilaian sehingga tidak tersedia data pembandingan. Pada tahun 2025, nilai IKK meningkat cukup signifikan menjadi 70,88, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibandingkan tahun sebelumnya yang dinilai.

Indikator IKM Perangkat Daerah baru mulai dapat dianalisis pada tahun 2024, karena pada tahun 2022 dan 2023 belum mengikuti penilaian. Pada tahun 2024, nilai IKM tercatat sebesar 88,00 yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat baik terhadap pelayanan perangkat daerah. Capaian ini relatif stabil pada tahun 2025 dengan nilai 88,73, yang berarti terjadi peningkatan meskipun tidak terlalu besar. Stabilitas nilai yang tinggi ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik telah terjaga dengan baik dan mampu memenuhi harapan masyarakat secara berkelanjutan.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra)

Memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Daerah sampai dengan tahun pelaporan dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Melalui perbandingan ini, dapat diketahui sejauh mana realisasi indikator kinerja utama telah bergerak menuju target akhir Renstra, sekaligus mengidentifikasi capaian yang telah memenuhi target, yang masih memerlukan peningkatan, maupun yang belum dapat diukur secara optimal. Analisis ini menjadi dasar penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai bahan evaluasi dan perumusan langkah perbaikan kinerja pada periode perencanaan selanjutnya dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Daerah. Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir renstra :

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran	Indikator	Realisasi	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akses Keuangan Daerah	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	4,24	4,21	100,71
2.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	70,88	80	88,6

No.	Sasaran	Indikator	Realisasi	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,73	91,8	96,65

Realisasi Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Tahun 2025 sebesar 4,24 telah melampaui target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 4,21, dengan tingkat capaian 100,71%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban dalam mendukung peningkatan akses keuangan masyarakat telah mencapai bahkan melebihi sasaran jangka menengah yang telah direncanakan. Capaian ini mencerminkan efektivitas koordinasi, fasilitasi, dan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program percepatan akses keuangan daerah sehingga target Renstra dapat diwujudkan lebih cepat dari yang direncanakan.

Untuk indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), realisasi kinerja tahun 2025 tercatat sebesar 70,88 dari target akhir Renstra sebesar 80. Berdasarkan perbandingan tersebut, tingkat kemajuan kinerja mencapai 88,6 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target jangka menengah telah terpenuhi. Meskipun demikian, masih terdapat selisih capaian yang perlu ditingkatkan agar target akhir Renstra dapat tercapai sepenuhnya, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

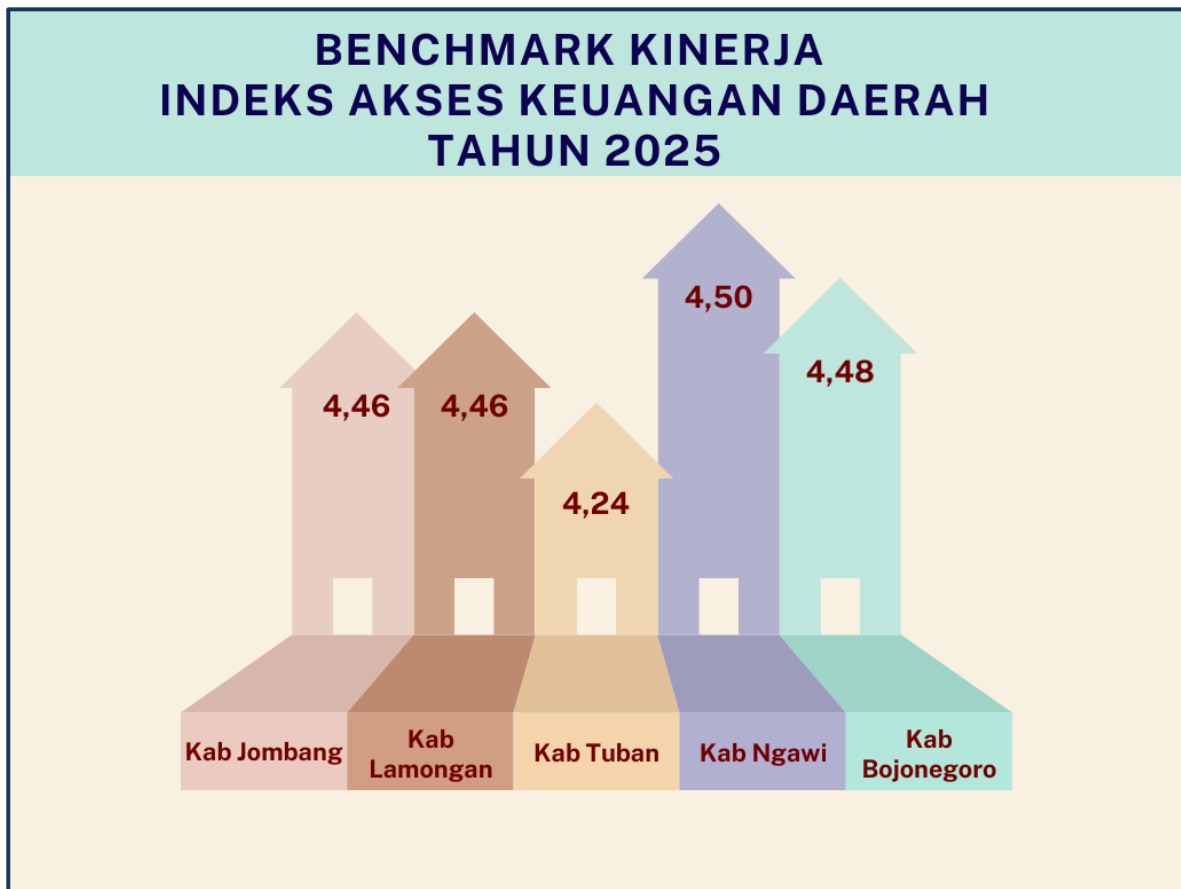
Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, realisasi kinerja tahun 2025 mencapai nilai 88,73 dari target akhir Renstra sebesar 91,8. Capaian tersebut menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 96,65 persen, yang mengindikasikan bahwa kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah mendekati target jangka menengah yang ditetapkan. Tingginya

persentase tingkat kemajuan ini mencerminkan kualitas pelayanan publik yang sudah sangat baik, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan secara berkelanjutan agar target akhir Renstra dapat tercapai sepenuhnya dan kepuasan masyarakat dapat terus ditingkatkan.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Organisasi Lain Yang Setipe/Provinsi/ Nasional (Benchmark Kinerja)

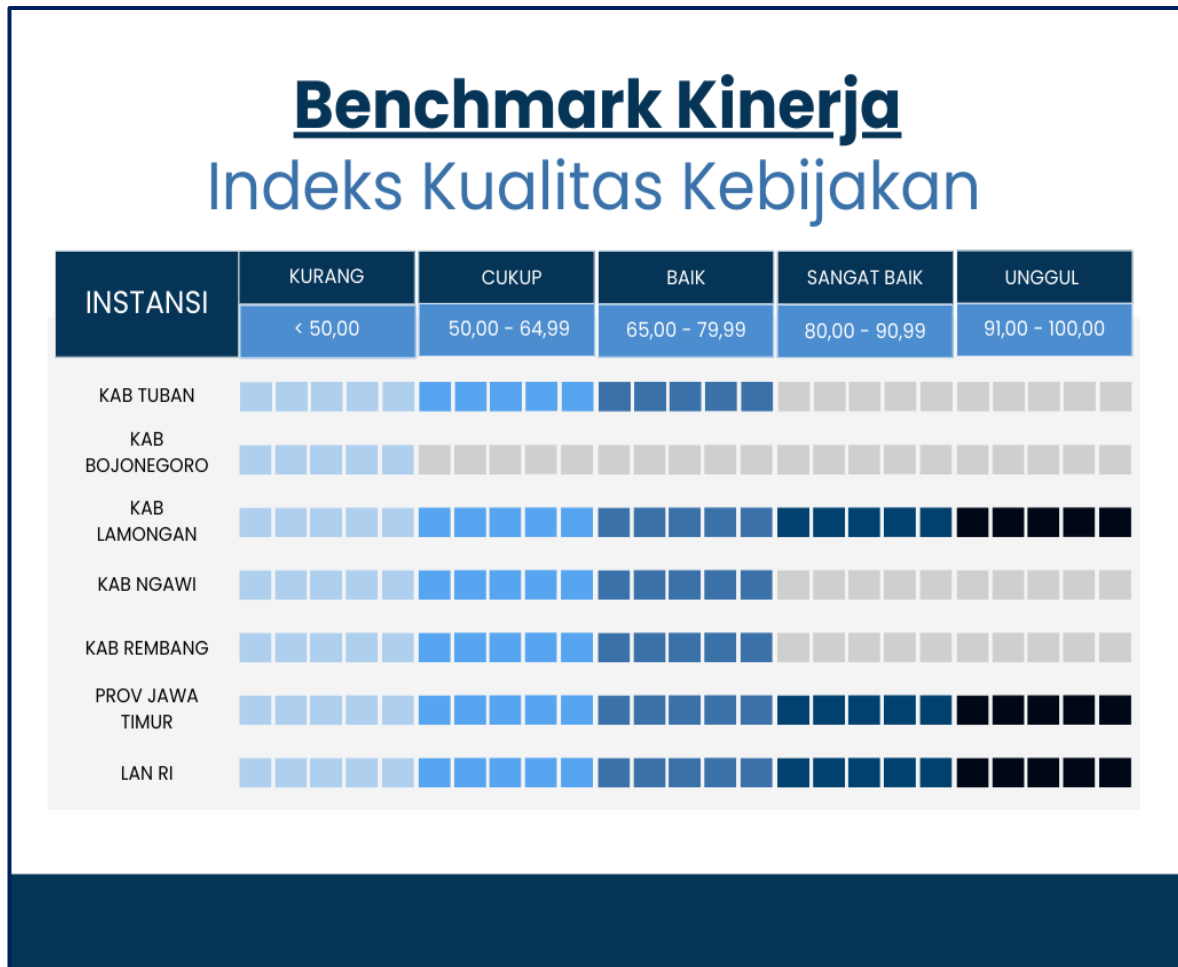
Memberikan gambaran posisi capaian kinerja Sekretariat Daerah pada tahun pelaporan dibandingkan dengan kinerja organisasi sejenis, baik pada tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Melalui pendekatan benchmark kinerja ini, dapat diketahui tingkat daya saing dan kesetaraan capaian indikator kinerja utama, sekaligus mengidentifikasi praktik baik (best practices) serta kesenjangan kinerja yang masih perlu ditingkatkan. Hasil perbandingan ini menjadi bahan evaluasi strategis dalam mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta sebagai dasar perumusan kebijakan dan langkah perbaikan yang lebih terarah guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Daerah.

Grafik 2
Benchmark Kinerja Indeks Akses Keuangan Daerah



Berdasarkan benchmark Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Tahun 2025, Kabupaten Tuban memperoleh nilai 4,24, yang berada di bawah kabupaten pembanding di wilayah sekitarnya, yaitu Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan yang masing-masing memperoleh nilai 4,46, Kabupaten Bojonegoro sebesar 4,48, serta Kabupaten Ngawi sebesar 4,50. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun capaian IKAD Kabupaten Tuban telah berada pada kategori yang baik dan telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra, masih terdapat ruang untuk meningkatkan akses keuangan daerah agar lebih kompetitif dibandingkan kabupaten sekitar. Sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah, capaian ini menjadi dasar evaluasi untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mendorong perluasan inklusi keuangan, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, serta optimalisasi kebijakan daerah yang mendukung penguatan ekosistem keuangan daerah secara berkelanjutan.

Grafik 3
Benchmark Kinerja Indeks Kualitas Kebijakan



Benchmark Kinerja Indeks Kualitas Kebijakan, Kabupaten Tuban menunjukkan capaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang berada pada kategori Baik. Capaian ini sejajar dengan beberapa kabupaten sekitar seperti Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Rembang yang juga berada pada rentang kategori yang sama. Namun demikian, jika dibandingkan dengan Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, serta LAN RI, capaian Kabupaten Tuban masih berada di bawah, karena instansi-instansi tersebut telah mencapai kategori Sangat Baik hingga Unggul. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kebijakan di Kabupaten Tuban sudah cukup solid, namun masih terdapat ruang peningkatan untuk menyamai praktik terbaik yang diterapkan oleh instansi dengan kinerja lebih tinggi.

Di sisi lain, capaian Kabupaten Tuban relatif lebih baik dibandingkan Kabupaten Bojonegoro yang masih berada pada kategori

Cukup, sehingga mencerminkan bahwa proses perumusan dan implementasi kebijakan di Kabupaten Tuban telah berjalan lebih sistematis dan terarah. Perbandingan ini memberikan gambaran objektif mengenai posisi kinerja Kabupaten Tuban di tingkat regional dan nasional, sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas kebijakan ke depan. Dengan penguatan tata kelola kebijakan, peningkatan kapasitas perancang kebijakan, serta pemanfaatan evaluasi berbasis bukti, diharapkan Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Tuban dapat meningkat menuju kategori Sangat Baik pada periode berikutnya.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan

A. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Tuban menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024, nilai IKAD tercatat sebesar 4,03, kemudian meningkat menjadi 4,24 pada Tahun 2025 atau naik sebesar 0,21 poin. Peningkatan tersebut menggambarkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal di Kabupaten Tuban, sekaligus menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban melalui koordinasi dan fasilitasi Sekretariat Daerah bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah memberikan hasil yang nyata. Capaian ini juga mengindikasikan bahwa target pembangunan di bidang akses keuangan daerah dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.
- Keberhasilan peningkatan nilai IKAD didukung oleh semakin kuatnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga jasa keuangan, perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Selain itu, pelaksanaan program edukasi dan literasi keuangan, pengembangan ekosistem keuangan inklusif, serta fasilitasi berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat turut berkontribusi terhadap peningkatan indeks tersebut. Dengan

capaian yang telah melampaui target, Pemerintah Kabupaten Tuban berkomitmen untuk terus menjaga keberlanjutan program percepatan akses keuangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

- Realisasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kabupaten Tuban sebesar 70,88 pada tahun pelaporan menunjukkan capaian kinerja yang melampaui target 67,5, sehingga berada pada kategori Baik. Keberhasilan pencapaian tersebut didorong oleh semakin meningkatnya kualitas proses perumusan kebijakan daerah yang telah mengacu pada prinsip kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), keterpaduan perencanaan dan penganggaran, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah. Selain itu, adanya peningkatan pemahaman aparatur terhadap tahapan penyusunan kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, analisis dampak, hingga evaluasi kebijakan, turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai indeks secara signifikan.

Meskipun target telah terlampaui, capaian Indeks Kualitas Kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi menghambat peningkatan ke kategori Sangat Baik. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain belum optimalnya pelibatan pemangku kepentingan secara luas dalam proses perumusan kebijakan, keterbatasan kualitas data pendukung kebijakan pada sektor tertentu, serta belum meratanya kapasitas analisis kebijakan di seluruh perangkat daerah. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas SDM, standardisasi proses penyusunan kebijakan, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan di periode berikutnya.

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah sebesar 88,73 menunjukkan bahwa target kinerja sebesar 88,7 telah tercapai. Capaian ini mencerminkan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah yang berada pada kategori sangat baik, didukung oleh konsistensi penerapan standar pelayanan, peningkatan responsivitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pelayanan administrasi dan

fasilitasi pemerintahan. Komitmen aparaturnya dalam memberikan layanan yang tertib, cepat, dan sesuai prosedur menjadi faktor utama keberhasilan pencapaian indikator ini.

Meskipun target telah tercapai, selisih capaian yang relatif tipis menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat masih perlu dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Tantangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas IKM antara lain meningkatnya ekspektasi pengguna layanan, dinamika beban kerja pada periode tertentu, serta kebutuhan peningkatan kualitas komunikasi dan kejelasan informasi layanan. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah perlu terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas SDM pelayanan, optimalisasi sistem layanan berbasis digital, serta pemanfaatan umpan balik masyarakat sebagai dasar penyempurnaan kualitas pelayanan di periode berikutnya.

B. Upaya Nyata Dan/Atau Hambatannya Atas Pencapaian Kinerja

- Peningkatan nilai Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Tuban merupakan hasil dari penguatan peran Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam membangun sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, perbankan, serta perangkat daerah terkait. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan pelaksanaan program kerja TPAKD yang berorientasi pada perluasan akses layanan keuangan, peningkatan inklusi keuangan masyarakat, serta penguatan koordinasi antarinstansi dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi daerah.
- Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tuban secara konsisten mendorong pelaksanaan berbagai program yang mendukung peningkatan akses keuangan, antara lain melalui edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat, fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, pengembangan produk dan layanan keuangan yang menjangkau masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan layanan keuangan digital. Berbagai upaya tersebut telah meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan formal oleh masyarakat dan pelaku usaha, sehingga memberikan kontribusi

nyata terhadap kenaikan nilai IKAD dari 4,03 pada Tahun 2024 menjadi 4,24 pada Tahun 2025.

- Realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Tuban sebesar 70,88 yang melampaui target 67,5 dan berada pada kategori Baik menunjukkan adanya upaya nyata Pemerintah Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kualitas proses perumusan dan implementasi kebijakan daerah. Upaya tersebut tercermin dari semakin diterapkannya prinsip kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta peningkatan pemahaman aparatur terhadap tahapan penyusunan kebijakan yang sistematis, mulai dari perencanaan, perumusan, hingga evaluasi kebijakan. Selain itu, pemanfaatan data dan hasil evaluasi program sebagai dasar pengambilan keputusan turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan ke kategori yang lebih tinggi. Hambatan tersebut antara lain belum optimalnya pelibatan pemangku kepentingan secara luas dalam proses perumusan kebijakan, keterbatasan kualitas dan ketersediaan data pendukung pada sektor tertentu, serta belum meratanya kapasitas analisis kebijakan di seluruh perangkat daerah. Kondisi ini menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, standarisasi proses penyusunan kebijakan, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi kebijakan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan pada periode berikutnya.

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah sebesar 88,73 yang telah melampaui target 88,7 menunjukkan adanya upaya nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan secara konsisten. Upaya tersebut antara lain penerapan standar pelayanan yang jelas, peningkatan kedisiplinan dan responsivitas aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan administrasi dan fasilitasi pemerintahan. Selain itu, adanya komitmen pimpinan dalam mendorong budaya pelayanan prima serta pelaksanaan evaluasi kepuasan pengguna layanan secara berkala turut berkontribusi terhadap tercapainya indikator kinerja ini.

Meskipun target telah tercapai, terdapat sejumlah hambatan yang perlu menjadi perhatian agar capaian kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Hambatan tersebut antara lain meningkatnya ekspektasi pengguna layanan terhadap kecepatan dan kualitas pelayanan, variasi beban kerja pada periode tertentu yang berpotensi memengaruhi ketepatan waktu layanan, serta masih perlunya peningkatan kualitas komunikasi dan kejelasan informasi pelayanan. Kondisi ini menjadi dasar bagi Sekretariat Daerah untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas SDM pelayanan, penyempurnaan sistem layanan berbasis digital, serta pemanfaatan umpan balik masyarakat sebagai bahan peningkatan kualitas pelayanan pada periode berikutnya.

C. Alternatif Solusi

- Nilai Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) telah melampaui target yang ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Tuban perlu terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas akses keuangan masyarakat. Alternatif solusi yang dapat dilakukan antara lain memperkuat koordinasi dan kolaborasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, perbankan, serta perangkat daerah agar pelaksanaan program peningkatan akses keuangan semakin terintegrasi dan tepat sasaran. Selain itu, perlu dilakukan perluasan jangkauan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, perempuan, dan kelompok rentan lainnya yang masih memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan keuangan formal. Pemerintah Kabupaten Tuban juga perlu mendorong pengembangan layanan keuangan digital, memperluas akses pembiayaan produktif, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap capaian program kerja TPAKD berdasarkan indikator IKAD. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan peningkatan nilai IKAD tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pertumbuhan

ekonomi daerah yang berkelanjutan.

- Pencapaian Indeks Kualitas Kebijakan Setda Kabupaten Tuban yang melampaui target, dari target 67,5 dengan realisasi sebesar 70,88, merupakan hasil dari penerapan berbagai alternatif solusi yang telah dilaksanakan secara konsisten dan terstruktur. Upaya tersebut meliputi penguatan proses perumusan kebijakan berbasis data dan bukti (evidence based policy), peningkatan kualitas koordinasi antar perangkat daerah dalam tahapan perencanaan dan evaluasi kebijakan, serta optimalisasi pelaksanaan kajian dan harmonisasi regulasi agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, Setda Kabupaten Tuban juga memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Rangkaian langkah tersebut secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kebijakan yang dihasilkan, sehingga mampu melampaui target yang ditetapkan dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
- Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda Kabupaten Tuban yang mencapai 88,73 dan sedikit melampaui target 88,70 merupakan hasil dari pelaksanaan berbagai alternatif solusi yang telah diterapkan secara berkelanjutan. Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan kualitas pelayanan administrasi melalui penyederhanaan prosedur, kepastian waktu layanan, serta peningkatan sikap dan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setda Kabupaten Tuban juga secara rutin melakukan survei kepuasan masyarakat dan menindaklanjuti hasilnya sebagai dasar perbaikan layanan, disertai penguatan mekanisme pengaduan dan respon cepat terhadap masukan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan transparansi informasi turut mendukung peningkatan persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Setda, sehingga capaian IKM dapat dipertahankan pada kategori sangat baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Dari uraian diatas kesimpulan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Penyebab Keberhasilan/kegagalan	Alternatif Solusi (Yang telah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindaklanjut
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akses Keuangan Daerah	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Tuban Tahun 2025 tercatat sebesar 4,24 didukung oleh ketersediaan lembaga jasa keuangan yang relatif merata, meningkatnya pemanfaatan layanan keuangan digital, serta peran aktif TPAKD dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi UMKM. • Faktor Internal : komitmen Pemerintah Daerah melalui koordinasi TPAKD, dukungan kebijakan daerah terhadap inklusi keuangan, serta fasilitasi	Meskipun IKAD telah melampaui target, Pemerintah Kabupaten Tuban perlu terus memperkuat koordinasi TPAKD dengan OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, perbankan, dan perangkat daerah agar program akses keuangan tetap terintegrasi dan tepat sasaran. Selain	• Memperkuat peran TPAKD dalam koordinasi program literasi dan inklusi keuangan yang lebih terarah dan berkelanjutan. • Mendorong perluasan akses layanan keuangan di wilayah perdesaan, khususnya melalui agen layanan keuangan dan digitalisasi. • Meningkatkan literasi dan pemanfaatan produk

Sasaran Strategis	Indikator	Penyebab Keberhasilan/kegagalan	Alternatif Solusi (Yang telah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindaklanjut
1	2	3	4	5
		program literasi dan akses pembiayaan. Faktor Eksternal : dukungan OJK dan lembaga jasa keuangan, perkembangan teknologi keuangan digital, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan formal.	itu, perlu diperluas edukasi literasi keuangan, akses pembiayaan produktif, dan layanan keuangan digital bagi masyarakat, khususnya UMKM dan kelompok rentan, agar peningkatan IKAD dapat terus dipertahankan.	keuangan formal bagi UMKM dan masyarakat produktif. Memperkuat sinergi dengan OJK dan lembaga jasa keuangan untuk mendukung pembiayaan inklusif dan berkelanjutan.
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Realisasi IKK Kabupaten Tuban sebesar 70,88 melampaui target 67,5 dan berada pada kategori Baik, didukung oleh penerapan kebijakan berbasis bukti, keterpaduan perencanaan-penganggaran, dan	Pencapaian Indeks Kualitas Kebijakan Setda Kabupaten Tuban yang melampaui target (70,88 dari target 67,5) didorong oleh	- Meningkatkan pelibatan pemangku kepentingan secara lebih luas dan terstruktur dalam proses perumusan kebijakan. - Memperkuat kapasitas SDM, khususnya

Sasaran Strategis	Indikator	Penyebab Keberhasilan/kegagalan	Alternatif Solusi (Yang telah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindaklanjut
1	2	3	4	5
		peningkatan kapasitas aparatur; namun peningkatan ke kategori Sangat Baik masih terkendala oleh keterlibatan pemangku kepentingan yang belum optimal, kualitas data yang terbatas, serta kapasitas analis kebijakan yang belum merata. • Faktor Internal: Pencapaian IKK didukung peningkatan kapasitas aparatur, penerapan kebijakan berbasis bukti, serta penguatan koordinasi dan keterpaduan perencanaan-penganggaran di lingkungan Pemkab Tuban.	penerapan kebijakan berbasis data dan bukti, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta optimalisasi kajian dan harmonisasi regulasi. Selain itu, pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan turut meningkatkan kualitas kebijakan dan mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.	analisis kebijakan, melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. • Menstandarkan proses penyusunan, monitoring, dan evaluasi kebijakan di seluruh perangkat daerah. • Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data sektoral sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti. • Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan

Sasaran Strategis	Indikator	Penyebab Keberhasilan/kegagalan	Alternatif Solusi (Yang telah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindaklanjut
1	2	3	4	5
		Faktor Eksternal: Didukung oleh regulasi dan pedoman kebijakan dari pemerintah pusat/provinsi serta ketersediaan referensi dan data pendukung dalam perumusan kebijakan daerah.		kebijakan di periode berikutnya.
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Realisasi IKM Sekretariat Daerah sebesar 88,73 telah mencapai target 88,7 dan berada pada kategori sangat baik, didukung penerapan standar pelayanan, responsivitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan masyarakat, diperlukan perbaikan berkelanjutan melalui penguatan	Pencapaian IKM Setda Kabupaten Tuban sebesar 88,73 yang melampaui target 88,70 didukung oleh penyederhanaan prosedur, kepastian waktu layanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan. Selain itu, pelaksanaan survei kepuasan	- Mengoptimalkan pemanfaatan layanan berbasis digital untuk meningkatkan kecepatan dan transparansi pelayanan. - Memperkuat mekanisme pengaduan serta respon cepat terhadap masukan masyarakat. - Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator	Penyebab Keberhasilan/kegagalan	Alternatif Solusi (Yang telah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindaklanjut
1	2	3	4	5
		SDM pelayanan, optimalisasi layanan digital, dan pemanfaatan umpan balik masyarakat. - Faktor Internal: Keberhasilan pencapaian IKM Setda didukung oleh konsistensi penerapan standar pelayanan, meningkatnya disiplin dan responsivitas aparatur, komitmen terhadap pelayanan yang cepat dan sesuai prosedur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan administrasi. - Faktor Eksternal: Didukung oleh meningkatnya kesadaran dan partisipasi	secara rutin, tindak lanjut hasil survei, dan penguatan mekanisme pengaduan turut menjaga kualitas layanan pada kategori sangat baik.	secara konsisten sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan melalui penyederhanaan prosedur dan kepastian waktu layanan.

Sasaran Strategis	Indikator	Penyebab Keberhasilan/kegagalan	Alternatif Solusi (Yang telah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindaklanjut
1	2	3	4	5
		masyarakat dalam memanfaatkan layanan, dukungan kebijakan dan regulasi pelayanan publik, serta perkembangan teknologi yang memudahkan akses dan transparansi layanan		

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya disusun untuk menilai sejauh mana sumber daya yang tersedia, baik anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana pendukung, telah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian kinerja. Analisis ini memberikan gambaran keterkaitan antara input yang digunakan dengan output dan outcome yang dihasilkan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Penghitungan analisis atas efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persentase Indikator Rincian Indeks RB General yang Berkategori Minimal Baik	84,21	85,00	100,93	88.826.54 4.278	75.983.29 7.507	85,54	117,99
I	Sasaran: Meningkatnya Akses Keuangan Daerah	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	4,08	4,24	103,92	1.242.722. 417	1.126.735. 926	90,67	114,61
IA	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	89,01	86,46	97,13	1.242.722. 417	1.126.735. 926	90,67	107,12
		Persentase Realisasi Kontribusi BUMD	1,06	0,96	90,57				99,88

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		terhadap PAD							
IA.1	Kegiatan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Level/Tingkat Kematangan UKPBJ	40	40	100,00	548.622.500	512.774.920	93,47	106,98
		Nilai Skor Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	13,33	22,86	171,49				183,47
		Nilai Pemanfaatan sistem pengadaan	25,95	23,6	90,94				97,29
IA.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	100,00	185.300.000	183.449.306	99,00	101,01
IA.1.2	Sub Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	1	100,00	186.585.000	172.332.855	92,36	108,27

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Elektronik	Elektronik							
IA.1 .3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200	200	100,00	176.737.500	156.992.759	88,83	112,57
IA.2	Kegiatan Penerapan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian	3	3	100,00	416.848.300	397.796.115	95,43	104,78
IA.2 .1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	2	2	100,00	190.070.925	189.077.865	99,48	100,52

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan BLUD	dan BLUD							
IA.2 .2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	1	100,00	189.660.3 75	178.836.8 00	94,29	106,05
IA.2 .3	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	1	100,00	37.117.00 0	29.881.45 0	80,51	124,20
IA.3	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah rumusan kebijakan bidang sumber daya alam	3	3	100,00	191.842.7 80	138.104.4 52	71,99	138,90
IA.3 .1	Sub Kegiatan Koordinasi,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	2	2	100,00	85.238.14 0	52.734.15 2	61,87	161,62

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja							
IA.3 .2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan	1	1	100,00	64.269.000	49.205.500	76,56	130,61

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian							
IA.3 .3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	1	100,00	42.335.64 0	36.164.80 0	85,42	117,06
IA.4	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi	Jumlah laporan administrasi pembangunan yang	1	1	100,00	85.408.83 7	78.060.43 9	91,40	109,40

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan	tersusun sesuai dengan ketentuan							
IA.4 .1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	1	100,00	22.443.95 0	19.612.40 0	87,38	114,44
IA.4 .2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	4	100,00	40.041.26 2	37.579.55 0	93,85	106,55
IA.4 .3	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	12	100,00	22.923.62 5	20.868.48 9	91,03	109,85

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Sasaran Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	67,5	70,88	105,00	38.467.44 7.515	36.609.80 3.304	95,17	110,32
IIB	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rancangan Kebijakan yang Mendukung Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan Daerah	100	100	100,00	38.467.44 7.515	36.609.80 3.304	95,17	105,07
		Indeks Zakat Nasional (IZN)	0,758	0,75	98,94				102,86

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Perda yang Disahkan	100	100	100,00				105,07
IIB. 1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Indikator Kunci	91	90	98,90	1.194.050.693	909.899.180	76,20	129,79
IIB. 1.1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2	2	100,00	91.714.812	64.681.000	70,52	141,80
IIB. 1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5	5	100,00	533.832.225	441.125.500	82,63	121,02
IIB.	Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen	4	4	100,00	568.503.656	404.092.680	71,08	130,68

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah							
IIB. 2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana dengan baik	86,96	69,57	80,00	34.827.11 5.514	33.553.97 0.620	96,34	120,42
IIB. 2.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12	12	100,00	8.391.136. 470	7.190.698. 120	85,69	116,69
IIB. 2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait	7	7	100,00	3.542.625. 004	3.528.525. 000	99,60	100,40

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	terkait Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB							
IIB. 2.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian	14	14	100,00	22.893.354.040	22.834.747.500	99,74	100,26

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas							
IIB. 3	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase kebijakan yang terbit sesuai dengan perencanaan	100	100	100,00	2.446.281. 308	2.145.933. 504	87,72	113,99
IIB. 3.1	Sub Kegiatan Fasilitasi	Jumlah Produk Hukum Daerah yang	230	250	108,69	837.277.2 04	830.229.6 79	99,16	109,61

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Disusun							
IIB. 3.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4	10	250,00	798.280.184	583.860.020	73,14	341,81
IIB. 3.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	226	289	127,87	810.723.920	731.843.805	90,27	141,65
III	Sasaran Meningkatnya Kepuasan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,7	88,73	100,03	49.116.374.346	38.246.758.277	77,87	128,45

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Masyarakat Terhadap Layanan								
IIIC	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	83,05	83,05	100,00	49.116.374.346	38.246.758.277	77,87	128,41
		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja dalam SAKIP Daerah	11,72	12,20	104,09				133,67
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dalam SAKIP Daerah	24,01	23,74	98,87				126,97
IIIC .1	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase OPD yang menyusun laporan kinerja sesuai dengan ketentuan	100	100	100,00	1.864.812.885	1.694.134.590	90,85	110,07
		Nilai kematangan	47,1	Belum	-				Belum

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		organisasi		Rilis					dapat dihitung dikarenakan realisasi tahun 2025 belum rilis
		Persentase OPD yang memenuhi kepatuhan dalam persyaratan penilaian IPP	93,33	92,21	98,79				107,42
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja sesuai ketentuan	100	100	100,00				110,07

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IIIC .1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	2	100,00	409.336.3 00	386.403.9 75	94,40	105,93
IIIC .1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	2	100,00	787.194.6 35	685.575.5 10	87,09	114,82
IIIC .1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	2	100,00	522.522.6 75	478.419.3 55	91,56	109,21
IIIC .1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan	1	1	100,00	145.759.2 75	143.735.7 50	98,61	101,40

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kinerja Pemerintah Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah							
IIIC .2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	9	9	100,00	122.043.559	117.692.113	96,43	103,70
IIIC .2.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100,00	94.953.634	90.902.763	95,73	104,46
IIIC .2.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja yang tersusun	7	7	100,00	27.089.925	26.789.350	98,89	101,12

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IIIC .3	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9	9	100,00	20.851.460.161	16.812.850.826	80,63	124,02
IIIC .3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan	140	140	100,00	20.640.637.161	16.629.804.826	80,57	124,11
IIIC .3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100,00	205.612.500	177.871.000	86,51	115,59
IIIC .3.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	4	4	100,00	5.210.500	5.175.000	99,32	100,68

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Akuntansi SKPD							
IIIC .4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	1	1	100,00	12.688.00 0	11.628.36 0	91,65	109,11
IIIC .4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	13	13	100,00	12.688.00 0	11.628.36 0	91,65	109,11
IIIC .5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5	5	100,00	4.399.405. 358	3.571.580. 810	81,18	123,18
IIIC .5.1	Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	2	2	100,00	97.028.71 6	63.040.70 0	64,97	153,91

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							
IIIC .5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	100,00	150.874.100	145.148.255	96,20	103,95
IIIC .5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	100,00	136.142.400	90.848.667	66,73	149,85
IIIC .5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100,00	2.764.586.500	2.233.884.000	80,80	123,76
IIIC	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Barang	2	2	100,00	529.417.075	510.224.040	96,37	103,76

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							
IIIC .5.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	8	8	100,00	92.469.00 0	92.360.00 0	99,88	100,12
IIIC .5.7	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	2	100,00	276.087.5 67	214.348.6 00	77,64	128,79
IIIC .5.8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00	352.800.0 00	221.726.5 48	62,85	159,10

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IIIC .6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	2	2	100,00	2.130.890. 135	1.032.460. 423	48,45	206,39
IIIC .6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	3	100,00	1.191.000. 000	189.810.0 00	15,94	627,35
IIIC .6.2	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	100,00	939.890.1 35	842.650.4 23	89,65	111,54
IIIC	Kegiatan Penyediaan	Jumlah Jenis	4	4	100,00	2.654.130. 632	2.243.976. 590	84,55	118,27

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.7	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Jasa Penunjang							
IIIC .7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100,00	14.000.000	6.900.000	49,29	202,88
IIIC .7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00	1.227.905.000	1.021.978.478	83,23	120,14
IIIC .7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	4	100,00	59.994.216	59.347.425	98,92	101,09

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		yang Disediakan							
IIIC .7.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00	1.352.231. 416	1.155.750. 687	85,47	117,00
IIIC .8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5	5	100,00	9.305.733. 306	7.723.049. 490	82,99	120,49
IIIC .8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	149	149	100,00	184.000.0 00	183.357.5 00	99,65	100,35

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya							
IIIC .8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	50	100,00	274.276.4 44	124.090.5 00	45,24	221,04
IIIC .8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	205	205	100,00	1.311.333. 899	847.666.1 99	64,64	154,70
IIIC .8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24	24	100,00	6.124.799. 123	5.263.847. 561	85,94	116,36

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IIC. 8.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	10	100,00	1.411.323.840	1.304.087.730	92,40	108,22
IIIC .9	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jenis laporan administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH	4	4	100,00	4.886.542.772	2.347.670.667	48,04	208,15
IIIC .9.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil	2	2	100,00	3.475.954.572	937.625.087	26,97	370,78

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kepala Daerah	Kepala Daerah							
IIIC .9.2	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2	2	100,00	204.588.2 00	204.565.3 00	99,99	100,01
IIIC .9.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	100,00	56.000.00 0	55.480.28 0	99,07	100,93
IIIC .9.4	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala	2	2	100,00	1.150.000. 000	1.150.000. 000	100,00	100,00

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
IIIC .10	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah laporan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	12	12	100,00	513.731.0 00	469.858.5 00	91,46	109,33
IIIC .10. 1	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala	2	2	100,00	513.731.0 00	469.858.5 00	91,46	109,33
IIIC .11	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah jenis laporan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	2	2	100,00	2.374.936. 538	2.221.855. 908	93,55	106,89

No.	Tujuan/Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IIIC .11. 1	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	12	100,00	462.020.0 00	364.086.9 77	78,80	126,90
IIIC .11. 2	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	12	100,00	1.912.916. 538	1.857.768. 931	97,12	102,96

Berdasarkan tabel efisiensi penggunaan sumber daya yang telah disusun, capaian nilai efisiensi Sekretariat Daerah secara umum berada pada kategori efisien hingga sangat efisien. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya efisiensi yang secara konsisten diterapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, baik pada aspek perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Upaya efisiensi ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat menghasilkan output dan kinerja yang optimal.

Salah satu strategi efisiensi yang diterapkan adalah perubahan metode pelaksanaan kegiatan, khususnya rapat koordinasi, asistensi, dan pendampingan. Kegiatan yang semula dilaksanakan secara luring dengan kebutuhan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi, dialihkan menjadi rapat dan pendampingan secara daring melalui platform konferensi video. Perubahan ini terbukti mampu menekan biaya perjalanan dinas tanpa mengurangi kualitas koordinasi dan pencapaian target kinerja.

Selain itu, Sekretariat Daerah juga melakukan pengendalian dan rasionalisasi belanja perjalanan dinas, di mana sebagian anggaran dialihkan untuk mendukung kebutuhan teknis kegiatan yang lebih langsung berdampak pada pencapaian kinerja, seperti pendampingan teknis, fasilitasi kebijakan, serta peningkatan kualitas koordinasi antarperangkat daerah. Pengalihan ini memungkinkan kegiatan tetap berjalan efektif dengan biaya yang lebih efisien.

Upaya efisiensi lainnya dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pendukung kerja, termasuk penggunaan aplikasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja, serta pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik. Optimalisasi ini membantu mempercepat proses kerja, mengurangi kebutuhan biaya administratif, dan meningkatkan akurasi pelaksanaan kegiatan, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih tepat sasaran.

Secara keseluruhan, hasil efisiensi yang tercermin dalam tabel menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah telah mampu mengelola sumber daya secara efektif dan adaptif, dengan mengedepankan inovasi pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran. Praktik efisiensi ini menjadi modal penting untuk menjaga kinerja tetap optimal sekaligus

memastikan keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai keterkaitan antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Melalui analisis ini, diidentifikasi berbagai faktor pendukung maupun penghambat, termasuk efektivitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pemanfaatan sumber daya, sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian sasaran kinerja maupun faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian tersebut.

Tabel 20

Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan

Sasaran Strategis	Indikator	Program Unggulan yang Mendukung	Alasan Mengapa Program/Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
Meningkatnya Akses Keuangan Daerah	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan, yang berfokus pada kegiatan fasilitasi sektor ekonomi, penguatan peran BUMD, serta koordinasi kebijakan perekonomian daerah. Program ini dinilai cukup efektif dalam menunjang capaian kinerja karena memiliki

Sasaran Strategis	Indikator	Program Unggulan yang Mendukung	Alasan Mengapa Program/Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
			keterkaitan langsung dengan indikator akses keuangan, didukung oleh koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Efektivitas program terlihat dari kemampuan mendorong perbaikan akses dan literasi keuangan meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat dua indikator yang belum tercapai secara optimal, yaitu: 1. Persentase Realisasi Kontribusi BUMD terhadap PAD Indikator ini belum tercapai karena belum optimalnya kinerja keuangan tiga BUMD, yaitu Perumda Aneka Tambang, Perumda Minyak dan Gas Bumi, dan PT Ronggolawe Sukses Mandiri. Perhitungan setoran dividen BUMD ke PAD tahun 2025 didasarkan pada laporan keuangan tahun 2024. Berdasarkan laporan tersebut, hanya Perumda Air Minum

Sasaran Strategis	Indikator	Program Unggulan yang Mendukung	Alasan Mengapa Program/Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
			Tirta Lestari yang berhasil mencatatkan laba dan melakukan setoran dividen ke PAD. Sementara itu, Perumda Aneka Tambang meskipun telah mencatatkan laba, namun nilai keuntungannya relatif sangat kecil sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan pembagian dividen kepada pemerintah daerah. Adapun PT Ronggolawe Sukses Mandiri dan Perumda Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2024 belum melaksanakan aktivitas operasional usaha secara efektif, sehingga belum menghasilkan pendapatan maupun laba yang dapat dikonversikan menjadi kontribusi terhadap PAD. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan manajemen usaha, restrukturisasi bisnis, serta percepatan operasional BUMD masih menjadi pekerjaan rumah dalam mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Sasaran Strategis	Indikator	Program Unggulan yang Mendukung	Alasan Mengapa Program/Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
			2. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Indikator ITKP juga belum tercapai karena beberapa faktor utama. Pertama, belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa di Kabupaten Tuban, baik dari sisi pemanfaatan fitur digital, integrasi perencanaan pengadaan, maupun konsistensi penggunaan sistem sesuai regulasi. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas proses pengadaan. Kedua, belum tercapainya target kualifikasi dan kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Keterbatasan jumlah personel yang memiliki sertifikasi serta kurangnya peningkatan kapasitas teknis dan manajerial menyebabkan proses pengadaan belum sepenuhnya berjalan sesuai standar tata kelola yang diharapkan. Kondisi ini berimplikasi pada nilai indeks tata kelola yang belum mampu

Sasaran Strategis	Indikator	Program Unggulan yang Mendukung	Alasan Mengapa Program/Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
			mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, meskipun Program Perekonomian dan Pembangunan telah menunjukkan kontribusi terhadap penguatan akses keuangan dan koordinasi kebijakan ekonomi daerah, optimalisasi kinerja BUMD dan peningkatan tata kelola pengadaan masih menjadi faktor kunci yang perlu diperkuat agar capaian indikator program dapat lebih maksimal pada periode berikutnya.
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang mencakup kegiatan perumusan, harmonisasi, dan evaluasi kebijakan daerah. Program ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas kebijakan karena berorientasi pada penguatan proses perencanaan, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas regulasi daerah. Namun

Sasaran Strategis	Indikator	Program Unggulan yang Mendukung	Alasan Mengapa Program/Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
			demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kegiatan yang memerlukan penyempurnaan, terutama dalam aspek sinkronisasi kebijakan dan kecepatan tindak lanjut rekomendasi, sehingga efektivitas program perlu terus ditingkatkan.
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang, yang berperan dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi, koordinasi internal, serta dukungan manajemen pemerintahan. Program ini secara umum telah menunjang pencapaian kinerja, namun beberapa kegiatan masih kurang mendapatkan respon positif dari masyarakat, terutama kegiatan yang bersifat administratif dan belum secara langsung dirasakan manfaatnya. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan jangkauan layanan dan persepsi masyarakat terhadap dampak kegiatan, sehingga diperlukan penajaman sasaran dan peningkatan kualitas layanan

Sasaran Strategis	Indikator	Program Unggulan yang Mendukung	Alasan Mengapa Program/Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian/Inovasi
1	2	3	4
			agar kontribusi program terhadap kepuasan masyarakat dapat lebih optimal.

3.2 Realisasi Anggaran

Analisis realisasi anggaran Sekretariat Daerah menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, dengan tingkat penyerapan anggaran yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta pengendalian anggaran yang baik. Dari total anggaran Sekretariat Daerah sebesar Rp88.826.544.278, realisasi anggaran mencapai Rp75.983.297.507 atau sebesar 85,54%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja. Realisasi anggaran tersebut digunakan secara efektif melalui kegiatan koordinasi, fasilitasi kebijakan, pendampingan teknis, serta dukungan administrasi pemerintahan. Adanya penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan, seperti optimalisasi pemanfaatan metode daring dan pengendalian belanja perjalanan dinas, turut berkontribusi terhadap efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan, sehingga realisasi anggaran mampu mendukung pencapaian kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dibawah ini disajikan tabel realisasi anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025.

Tabel 21
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
	Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	88.826.544.278	75.983.297.507	85,54
I	Sasaran: Meningkatnya Akses Keuangan Daerah	1.242.722.417	1.126.735.926	90,67
IA	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.242.722.417	1.126.735.926	90,67
IA.1	Kegiatan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	548.622.500	512.774.920	93,47

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
IA.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	185.300.000	183.449.306	99,00
IA.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	186.585.000	172.332.855	92,36
IA.1.3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	176.737.500	156.992.759	88,83
IA.2	Kegiatan Penerapan Kebijakan Perekonomian	416.848.300	397.796.115	95,43
IA.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	190.070.925	189.077.865	99,48
IA.2.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	189.660.375	178.836.800	94,29
IA.2.3	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	37.117.000	29.881.450	80,51
IA.3	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	191.842.780	138.104.452	71,99
IA.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	85.238.140	52.734.152	61,87
IA.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan	64.269.000	49.205.500	76,56

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
	dan Lingkungan Hidup			
IA.3.3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	42.335.640	36.164.800	85,42
IA.4	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	85.408.837	78.060.439	91,40
IA.4.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	22.443.950	19.612.400	87,38
IA.4.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	40.041.262	37.579.550	93,85
IA.4.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	22.923.625	20.868.489	91,03
II	Sasaran Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	38.467.447.515	36.609.803.304	95,17
IIB	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	38.467.447.515	36.609.803.304	95,17
IIB.1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	1.194.050.693	909.899.180	76,20
IIB.1.1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	91.714.812	64.681.000	70,52
IIB.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	533.832.225	441.125.500	82,63
IIB.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	568.503.656	404.092.680	71,08
IIB.2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan	34.827.115.514	33.553.970.620	96,34

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
	Rakyat			
IIB.2.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.391.136.470	7.190.698.120	85,69
IIB.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	3.542.625.004	3.528.525.000	99,60
IIB.2.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	22.893.354.040	22.834.747.500	99,74
IIB.3	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.446.281.308	2.145.933.504	87,72
IIB.3.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	837.277.204	830.229.679	99,16
IIB.3.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	798.280.184	583.860.020	73,14
IIB.3.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	810.723.920	731.843.805	90,27
III	Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	49.116.374.346	38.246.758.277	77,87
IIIC	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.116.374.346	38.246.758.277	77,87
IIIC.1	Kegiatan Penataan Organisasi	1.864.812.885	1.694.134.590	90,85
IIIC.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan	409.336.300	386.403.975	94,40

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
	Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
IIIC.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	787.194.635	685.575.510	87,09
IIIC.1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	522.522.675	478.419.355	91,56
IIIC.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	145.759.275	143.735.750	98,61
IIIC.2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.043.559	117.692.113	96,43
IIIC.2.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	94.953.634	90.902.763	95,73
IIIC.2.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.089.925	26.789.350	98,89
IIIC.3	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.851.460.161	16.812.850.826	80,63
IIIC.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.640.637.161	16.629.804.826	80,57
IIIC.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	205.612.500	177.871.000	86,51
IIIC.3.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.210.500	5.175.000	99,32
IIIC.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.688.000	11.628.360	91,65

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
IIIC.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.688.000	11.628.360	91,65
IIIC.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.399.405.358	3.571.580.810	81,18
IIIC.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	97.028.716	63.040.700	64,97
IIIC.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.874.100	145.148.255	96,20
IIIC.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	136.142.400	90.848.667	66,73
IIIC.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.764.586.500	2.233.884.000	80,80
IIIC.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	529.417.075	510.224.040	96,37
IIIC.5.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	92.469.000	92.360.000	99,88
IIIC.5.7	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	276.087.567	214.348.600	77,64
IIIC.5.8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	352.800.000	221.726.548	62,85
IIIC.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	2.130.890.135	1.032.460.423	48,45

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
	Pemerintahan Daerah			
IIIC.6.1	Pengadaan Mebel	1.191.000.000	189.810.000	15,94
IIIC.6.2	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	939.890.135	842.650.423	89,65
IIIC.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.654.130.632	2.243.976.590	84,55
IIIC.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000	6.900.000	49,29
IIIC.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.227.905.000	1.021.978.478	83,23
IIIC.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.994.216	59.347.425	98,92
IIIC.7.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.352.231.416	1.155.750.687	85,47
IIIC.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.305.733.306	7.723.049.490	82,99
IIIC.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184.000.000	183.357.500	99,65
IIIC.8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	274.276.444	124.090.500	45,24

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
IIIC.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.311.333.899	847.666.199	64,64
IIIC.8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.124.799.123	5.263.847.561	85,94
IIC.8.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.411.323.840	1.304.087.730	92,40
IIIC.9	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.886.542.772	2.347.670.667	48,04
IIIC.9.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.475.954.572	937.625.087	26,97
IIIC.9.2	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	204.588.200	204.565.300	99,99
IIIC.9.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	56.000.000	55.480.280	99,07
IIIC.9.4	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.150.000.000	1.150.000.000	100,00
IIIC.10	Kegiatan Fasilitasi	513.731.000	469.858.500	91,46

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
	Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
IIC.10.1	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	513.731.000	469.858.500	91,46
IIC.11	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.374.936.538	2.221.855.908	93,55
IIC.11.1	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	462.020.000	364.086.977	78,80
IIC.11.2	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1.912.916.538	1.857.768.931	97,12

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat Daerah pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif dan akuntabel meskipun berada pada masa transisi perencanaan antara Renstra lama Tahun 2021–2026 dan Renstra baru Tahun 2025–2030. Analisis kinerja masih mengacu pada indikator dan sasaran strategis Renstra 2021–2026, namun telah mulai diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas yang tertuang dalam Renstra 2025–2030 guna menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pemerintahan. Dari sisi pengelolaan anggaran, Sekretariat Daerah mampu mencapai tingkat realisasi anggaran sekitar 85,54%, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengendalian anggaran yang cukup baik dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Ditinjau dari indikator kinerja utama, terdapat tiga indikator strategis yang menjadi tolok ukur capaian kinerja Sekretariat Daerah. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 4,24 melampaui dari target yang ditetapkan yaitu 4,08 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Tuban telah berada pada kategori baik dalam hal akses keuangan daerah. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebesar 70,88, melampaui target yang ditetapkan sebesar 67,5, yang mengindikasikan semakin meningkatnya kualitas perumusan dan implementasi kebijakan daerah. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah tercapai sebesar 88,73 dari target 88,7, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi dan dukungan pemerintahan telah memenuhi ekspektasi masyarakat. Secara umum, capaian tersebut menegaskan bahwa kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 berada pada kategori baik dan menjadi landasan yang kuat untuk peningkatan kinerja pada periode Renstra 2025–2030.

Hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 ini menjadi dasar penting bagi Sekretariat Daerah dalam memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja pada periode Renstra 2025–2030. Tantangan yang muncul, khususnya terkait keterbatasan data capaian indikator eksternal seperti IKAD, menjadi perhatian untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kesiapan data pendukung kinerja. Selain itu, capaian positif pada indikator IKK dan IKM perlu

dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan administrasi, serta inovasi dalam mendukung perumusan kebijakan daerah. Dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada hasil, Sekretariat Daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah pada periode perencanaan selanjutnya.

4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam LKjIP, serta mempertimbangkan capaian indikator kinerja, tingkat realisasi anggaran, dan dinamika transisi perencanaan antara Renstra 2021–2026 dan Renstra 2025–2030, maka diperlukan langkah tindak lanjut yang terarah dan berkelanjutan. Rekomendasi tindak lanjut ini disusun sebagai upaya untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah baik, mengatasi kendala yang masih dihadapi, serta mendorong peningkatan akuntabilitas dan kualitas kinerja Sekretariat Daerah pada periode perencanaan berikutnya.

Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, khususnya terhadap indikator yang bersumber dari instansi eksternal seperti IKAD, IKK, melalui peningkatan koordinasi dan ketersediaan data pendukung yang memadai.

2. Optimalisasi Perencanaan dan Realisasi Anggaran

Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja agar realisasi anggaran lebih optimal, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

3. Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan

Mempertahankan capaian Indeks Kualitas Kebijakan yang telah melampaui target melalui penguatan proses perumusan kebijakan yang berbasis data, evaluatif, dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat

Menindaklanjuti hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dengan perbaikan berkelanjutan terhadap standar pelayanan, kompetensi aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi pemerintahan.

5. Penguatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelaporan Kinerja

Meningkatkan kualitas penyusunan LKjIP dengan analisis kinerja yang lebih komprehensif, konsistensi data kinerja dan keuangan, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam memperkuat kinerja dan akuntabilitas Sekretariat Daerah secara berkelanjutan. Dengan komitmen bersama seluruh perangkat dan dukungan pimpinan, Sekretariat Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan peran koordinatif dan fasilitatifnya, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan administrasi, dan memastikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja. Implementasi rekomendasi ini juga diharapkan dapat mendorong pencapaian sasaran strategis yang lebih optimal pada periode Renstra 2025–2030 serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Tuban, Februari 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban



Dr. Ir. Badi Wiyana, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19671005 199202 1 004



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA APBD 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si
NIK : 3523160510670001
NIP : 196710051992021004
Jabatan : Sekretaris Daerah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Aditya Halindra Faridzky, SE
Jabatan : Bupati Tuban

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama bersedia di berikan sanksi oleh Pihak Kedua berupa pengurangan penerimaan tambahan penghasilan pegawai, pemberhentian dari jabatan, dan sanksi lainnya atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa menuntut apapun.

Pihak Kedua,
Bupati Tuban

Aditya Halindra Faridzky, SE

Tuban, 17 Januari 2025
Pihak Pertama,
Sekretaris Daerah



Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 196710051992021004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

Sasaran/Indikator	Target
1. Terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama	
- Jumlah kebijakan yang berpihak kepada kerukunan hidup antar umat beragama	32 Kebijakan
- Persentase kebijakan yang selaras	100 %
2. Meningkatnya Kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD	
- Persentase peningkatan kontribusi BLUD dan BUMD terhadap PAD	1,05 %
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	
- Nilai SAKIP Kabupaten	78,36 Nilai

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	39.866.332.920	APBD
2. Perekonomian dan Pembangunan	1.587.105.830	APBD
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	47.958.202.584	APBD
JUMLAH	89.411.641.334	

Pihak Kedua,
Bupati Tuban



Aditya Halindra Faridzky, SE

Tuban, 17 Januari 2025

Pihak Pertama,
Sekretaris Daerah



Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 196710051992021004



PERJANJIAN KINERJA P APBD 2025



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si
NIK : 3523160510670001
NIP : 196710051992021004
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE
Jabatan : BUPATI TUBAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama bersedia diberikan sanksi oleh Pihak Kedua berupa pengurangan penerimaan tambahan penghasilan pegawai, pemberhentian dari jabatan, dan sanksi lainnya atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa menuntut apapun.

Tuban, September 2025

Pihak Kedua,
BUPATI TUBAN

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DAERAH

ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	
KASUBAG/JF	



Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196710051992021004

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akses Keuangan Daerah	1. Indeks Akses Keuangan Daerah	4,08
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	2. Indeks Kualitas Kebijakan	67,50
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,7

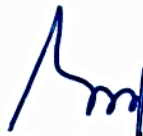
	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 38.467.447.515	P APBD
2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 1.242.722.417	P APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 49.116.374.346	P APBD
J U M L A H		Rp. 88.826.544.278	

Tuban, September 2025

Pihak Kedua,
BUPATI TUBAN

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DAERAH

ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE


Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196710051992021004

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	
KASUBAG/JF	

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TEMATIK DAN PRIORITAS TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akselerasi	Keterangan
1	Sasaran Kabupaten : Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	86,35	Penunjang
2	Tujuan Kabupaten : Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah serta percepatan pengentasan kemiskinan	PDRB Per Kapita	73	Penunjang
3		Tingkat Kemiskinan	13,54	Penunjang
4	Sasaran Kabupaten : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,12	Penunjang
5		Rasio Gini	0,331	Penunjang
6	Tujuan Kabupaten : Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	94,19	Utama
7	Sasaran Kabupaten : Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	83,42	Utama
8	Sasaran Kabupaten : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,49	Penunjang
9		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,39	Utama
10	Tujuan OPD : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase indikator rincian indeks RB General yang berkategori minimal baik	84,21	Utama
11	Sasaran OPD : Meningkatnya akses keuangan daerah	Indeks Akses Keuangan daerah (IKAD)	4,08	Utama

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akselerasi	Keterangan
12	Sasaran OPD : Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	68,50	Utama
13	Sasaran OPD : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,7	Utama

Tuban, September 2025

Pihak Kedua,
BUPATI TUBAN

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DAERAH

ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE


Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671005 199202 1 004

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	
KASUBAG/JF	



SK IKU TAHUN 2025 - 2029



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kartini Nomor 2 Tuban, Jawa Timur 62311 Telp. (0356) 321020
Laman: <https://setda.tubankab.go.id/> Pos-el: umum@tubankab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 100.3.3.5/ 62 /KPTS/414.012/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 – 2029

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, diperlukan perumusan Indikator Kinerja Utama yang terukur dan relevan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2045;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029;
9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 109 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja yang sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 28 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR 100.3.3.5/ 62 /KPTS/414.012/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN
2025-2029

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Tugas : Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Fungsi : a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 – 2029

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Persentase Indikator Rincian Indeks Reformasi Birokrasi General yang Berkategori Minimal Baik	%	Jumlah Indikator Rincian Indeks Reformasi Birokrasi General yang Berkategori Minimal Baik / Jumlah Total Indikator Rincian Indeks Reformasi Birokrasi General X 100%	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
1.		Meningkatnya Akses Keuangan Daerah	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	Indeks Akses Keuangan Daerah	Otoritas Jasa Keuangan	Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan
2.		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	Lembaga Administrasi Negara	Bagian Hukum

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
3.		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA



SK TIM

MONITORING DAN EVALUASI



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kartini Nomor 2 Tuban, Jawa Timur 62311 Telp. (0356) 321020 –
321003 Laman <http://setda.tubankab.go.id/>, Pos-el umum@tubankab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 188.45/ 83 /KPTS/414.012/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI, PELAPORAN DAN PUBLIKASI KINERJA
DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, dan menuangkannya dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang-Nomor 9 tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/3/KPTS/414.012/2024 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat yang diberi Wewenang untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:

- a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban;
- b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban;

- c. melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban;
- d. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban;
- e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban; dan
- g. melaporkan hasilnya pada Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 188.45/ 83 /KPTS/414.012/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI, PELAPORAN DAN PUBLIKASI
KINERJA DI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI,
PELAPORAN DAN PUBLIKASI KINERJA
DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN ORGANIK
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
2.	Penanggung jawab	a. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban; c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten;
3.	Koordinator	a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban; b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban; c. Kepala Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban; d. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban; e. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban;
4.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
5.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
6.	Anggota :	a. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban;

		b. Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban; c. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban; d. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban; e. Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban; f. Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban; g. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban; h. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian, Sumber Daya Manusia dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban; i. Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Perekonomian, Sumber Daya Manusia dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban; j. Pranata Komputer Terampil pada Bagian Perekonomian, Sumber Daya Manusia dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban; k. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban; l. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban;
--	--	--

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA



SOP **PENGUMPULAN** **DATA** **KINERJA**



KABUPATEN TUBAN
BAGIAN ORGANISASI

Nomor SOP 065/105/414.032/2022

Tanggal Pembuatan 10 Januari 2022

Tanggal Revisi 07 Juni 2022

Tanggal Efektif 07 Juni 2022

Disahkan Oleh

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
BAGIAN ORGANISASI
KABUPATEN TUBAN

Drs. SUGENG WINARNO, MM
197103171992011003

BAGIAN ORGANISASI

Nama SOP

PENGUMPULAN DATA KINERJA

DEFINISI

-

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Bupati Tuban Nomor 167 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami sistem perencanaan
2. Memahami sistem penatausahaan keuangan
3. Memahami sistem penatausahaan barang milik daerah
4. Memahami sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. PERENCANAAN REFORMASI BIROKRASI

1. Perangkat komputer/ laptop/ printer
2. Renstra
3. Renja
4. Format pengumpulan data kinerja

PERINGATAN

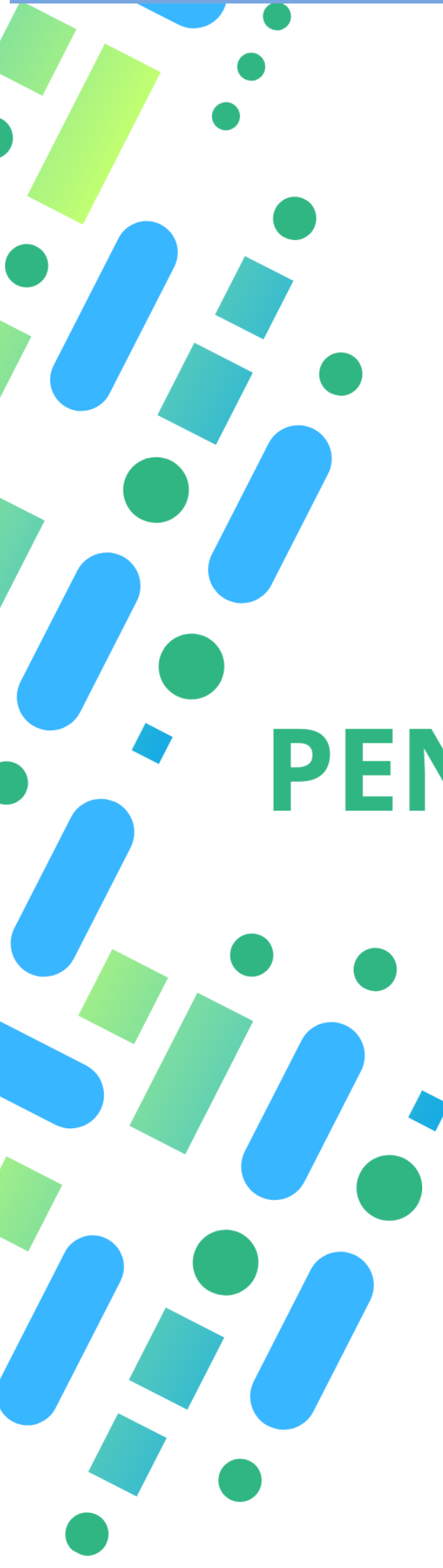
PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pelaporan akuntabilitas kinerja tidak berjalan optimal

1. Didokumentasikan secara manual

SOP: PENGUMPULAN DATA KINERJA

No	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	JF PERENCANA AHLI MUDA	PELAKSANA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan untuk menyusun laporan kinerja						10 Menit	Disposisi	
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bagian						2 Jam	Format pengumpulan kinerja	
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bagian						1 Jam	Format pengumpulan data kinerja	
4	Memfasilitasi rapat dengan kepala bagian dan kasubag untuk rapat pembahasan data dan informasi kinerja						30 Menit		
5	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bagian						3 Jam	Draft pengumpulan data kinerja	
6	Menganalisis data dan informasi kinerja yang telah terkumpul dan membuat draft dokumen kinerja						5 Hari	Draft pengumpulan data kinerja	
7	Menyampaikan dokumen kinerja kepada Kepala Bagian untuk dikoreksi dan memintakan persetujuan						1 Jam	Dokumen Kinerja	
8	Penandatanganan dokumen kinerja oleh Sekretaris Daerah						10 menit	Dokumen kinerja	



SOP **PENYUSUNAN** **LAPORAN** **KINERJA**

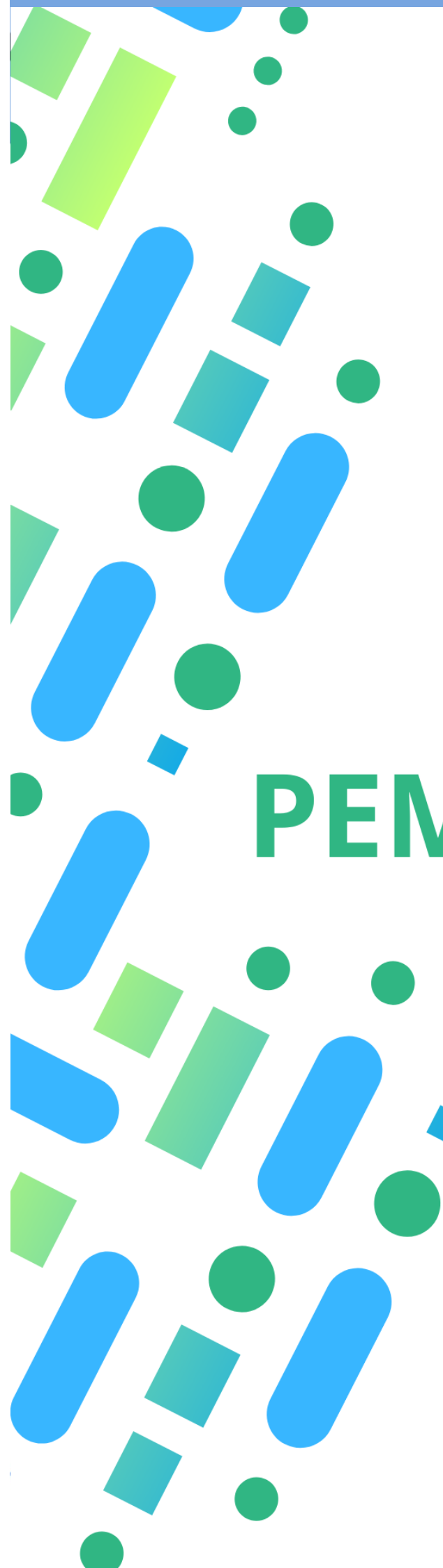


KABUPATEN TUBAN
BAGIAN ORGANISASI

KABUPATEN TUBAN BAGIAN ORGANISASI	Nomor SOP	065/104/414.032/2022
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2022
	Tanggal Revisi	07 Juni 2022
	Tanggal Efektif	07 Juni 2022
	Disahkan Oleh	KEPALA BAGIAN ORGANISASI BAGIAN ORGANISASI KABUPATEN TUBAN <u>Drs. SUGENG WINARNO, MM</u> 197103171992011003
BAGIAN ORGANISASI	Nama SOP	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LKjIP)
DEFINISI		
-		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2. Peraturan Bupati Tuban Nomor 167 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban	1. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. PENGUMPULAN DATA KINERJA	1. Komputer/ Laptop/ Printer 2. Dokumen Perjanjian Kinerja 3. Renstra 4. Data Capaian Kinerja	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka proses penyusunan LKjIP tidak berjalan maksimal	1. Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Kinerja	

SOP: PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LKjIP)

No	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	JF PERENCANA AHLI MUDA	PELAKSANA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan penyusunan LKjIP						10 Menit	Disposisi	
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bagian						2 Jam	Form pengumpulan data LKjIP	
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing Kepala Bagian						1 Jam	Form Pengumpulan data LKjIP	
4	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bagian						4 Jam	Form pengumpulan data LKjIP	
5	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul						4 Hari	Form Pengumpulan Data LKjIP	
6	Membuat Dokumen LKjIP						5 Hari	Draft LKjIP	
7	Mengoreksi Dokumen LKjIP						1 Hari	Dokumen LKjIP	
8	Menyampaikan Dokumen LKjIP kepada Sekretaris Daerah untuk meminta persetujuan						1 Jam	Dokumen LKjIP	
9	Penandatanganan Dokumen LKjIP oleh Sekretaris Daerah kemudian diteruskan ke Kepala Bagian Organisasi						10 Menit	Dokumen LKjIP	
10	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus permohonan surat, kemudian diserahkan ke pelaksana untuk dikirimkan ke alamat yang dituju						15 menit	Surat Pengantar	
11	Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen LKjIP						1 Jam	Dokumen LKjIP	



BERITA ACARA PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA STRATEGIS

BERITA ACARA

Pada hari ini, Selasa Enam Januari Dua Ribu Dua Puluh Enam pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Dandang Wacono telah dilaksanakan Rapat terkait Pembahasan Capaian Kinerja Strategis Sekretariat Daerah dengan Tim Perencanaan Internal Sekretariat Daerah, dalam pembahasan tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil rapat pembahasan kinerja strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, diperoleh kesepahaman bahwa penyusunan dan penguatan kinerja strategis Sekretariat Daerah harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029. Rapat tersebut menegaskan pentingnya kejelasan keterkaitan antara kinerja strategis, program pendukung, serta peran masing-masing bagian dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan akuntabel.
2. Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029 sebagaimana dibahas dalam rapat dimaksud, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban menetapkan tiga indikator kinerja utama, yaitu Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pencapaian masing-masing indikator kinerja utama tersebut didukung oleh program dan diampu oleh bagian-bagian terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagai berikut:
 - a. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) didukung oleh Program Perekonomian dan Pembangunan, yang pelaksanaannya diampu oleh Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Administrasi Pembangunan serta Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa. Kedua bagian tersebut melaksanakan perumusan dan fasilitasi kebijakan, koordinasi, serta dukungan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan akses keuangan daerah dan penguatan pembangunan ekonomi daerah. Adapun capaian IKAD Tahun 2025 hingga saat ini belum dapat dilaporkan karena hasil penilaian resmi masih menunggu rilis dari instansi pengampu, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - b. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) didukung oleh Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang pelaksanaannya diampu oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Bagian Hukum. Bagian-bagian tersebut berperan dalam penyusunan, harmonisasi, fasilitasi, serta evaluasi

kebijakan daerah guna mewujudkan kebijakan yang berkualitas, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian nilai IKK Kabupaten Tuban mencapai 70,88 dan berada dalam kategori baik, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 67,5.

- c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didukung oleh Program Penunjang, yang pelaksanaannya diampu oleh Bagian Organisasi serta Bagian Umum. Kedua bagian tersebut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dukungan manajemen, peningkatan tata kelola organisasi, serta pelayanan administrasi guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi nilai IKM Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban mencapai 88,73, yang telah melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 88,7.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai hasil rapat pembahasan capaian kinerja strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar tindak lanjut penyesuaian kebijakan, program, serta pembagian peran dan fungsi bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029.

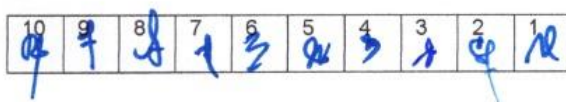
Tuban, 06 Januari 2026

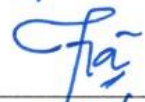
Peserta Rapat

Rapat Pembahasan Kinerja Strategis Sekretariat Daerah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. M. Mahmud, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2.	Saefiyudin, S.STP, M.AP	Plt. Kepala Bagian Organisasi	
3.	Dwi Erlina Novitasari, S.Pi, M.Pi	Analisis Kebijakan	
4.	Andi Sukirno, SE.	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda	
5.	Yetti Nur Afni, S.Th.I	Kasubbag. Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan	
6.	Sri Indarti, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
7.	Khusnul Indayani, S.Tr.IP	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	
8.	Feriadi Saputro, SE	Analisis Perekonomian	
9.	Tia Nurjana Mega Sari, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	
10.	Eka Sri Kusuma Dewi, A.Md.A.B.	Pengolah Data dan Informasi	

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
									



BUKTI DUKUNG CAPAIAN IKU

Kebijakan Diajukan

Kebijakan Disetujui

Kebijakan Diproses

Kebijakan Selesai

NO	NAMA KEBIJAKAN	ANALIS INSTANSI	NILAI SELF ASSESMENT	NILAI AKHIR PER INDIKATOR i	NILAI AKHIR IKK	NILAI IKK INSTANSI
1	INOVASI SI MAS GANTENG (TRANSPORTASI MASYARAKAT TUBAN YANG ELEGAN, AMAN, NYAMAN DAN TERINTEGRASI) - Fasilitas Penyediaan Angkutan Umum untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, khususnya pelajar dan masyarakat umum, perlu dilakukan fasilitas penyediaan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau di wilayah Kabupaten Tuban;	Kusno Nugroho, SH, MAP	100	PK: 21.875 IK: 91.25 EK: 67.5 TP: 100 JF:	72.4375	70.88 Nilai IKK Instansi
2	Penanggulangan Penyakit Tidak Menular - Merupakan kebijakan dalam rangka upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang Sinergitas Program Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular	Ulfa Imroatul Azizah, SH	100	PK: 40.625 IK: 91.25 EK: 83.75 TP: 75 JF:	77.3125	
3	PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022-2024 - Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tuban Tahun 2022-2024 merupakan upaya strategis yang dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor dan lintas lembaga untuk menurunkan prevalensi stunting secara signifikan dan berkelanjutan	Dwi Erlina Novitasari, S.Pi, M.Pi	100	PK: 40.625 IK: 65 EK: 57.5 TP: 75 JF:	62.875	

Nilai Indeks Kualitas Kebijakan



KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 737/K.1/HKM.02.2/2025

TENTANG

HASIL PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan kebijakan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pelaksanaan pengukuran sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diperoleh hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola kebijakan, penguatan kapasitas organisasi, serta penyusunan rekomendasi perbaikan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kebijakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2025;

SK LAN tentang Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan

373	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Baik
374	Pemerintah Kabupaten Tangerang	Kurang
375	Pemerintah Kabupaten Tanggamus	Kurang
376	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Cukup
377	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Kurang
378	Pemerintah Kabupaten Tapin	Sangat Baik
379	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	Sangat Baik
380	Pemerintah Kabupaten Tebo	Kurang
381	Pemerintah Kabupaten Tegal	Baik
382	Pemerintah Kabupaten Temanggung	Baik
383	Pemerintah Kabupaten Toba	Sangat Baik
384	Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una	Sangat Baik
385	Pemerintah Kabupaten Toli Toli	Kurang
386	Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	Kurang
387	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Baik
388	Pemerintah Kabupaten Tuban	Baik
389	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	Cukup
390	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Sangat Baik
391	Pemerintah Kabupaten Wajo	Cukup
392	Pemerintah Kabupaten Wakatobi	Cukup
393	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	Baik
394	Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Sangat Baik

Kategori Indeks Kualitas Kebijakan Kab. Tuban



SERTIFIKAT

Nomor : 037.023/Sert/PT.CSI/XI/2025



StatsMe
Consult, Training & Research

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) BAGIAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

NILAI IKM	RESPONDEN
88,73 (Baik)	30 Orang
	<u>Jenis Kelamin</u>
	Laki-Laki : 17 orang
	Perempuan : 13 orang
	<u>Pendidikan</u>
	SD/Sederajat : 0 orang
	SMP/Sederajat : 0 orang
	SMA/Sederajat : 14 orang
	D1/D2/D3 : 6 orang
	D4/S1 : 10 orang
	S2 : 0 orang
	S3 : 0 orang
Periode Survei : 08 September - 03 Oktober 2025	

Surabaya, 10 November 2025

Lussi Agustin, S.Stat., M.KP.

Direktur Utama

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat



15. SKOR IKAD PROVINSI...



15. SKOR IKAD PROVINSI JAWA TIMUR

Sheet1

	A	B	C
1	Kabupaten/Kota	Capaian IKAD 2025	Penyesuaian/ Usulan Target 2027
2	Kab. Pacitan	4,38	4,46
3	Kab. Ponorogo	4,53	4,60
4	Kab. Trenggalek	3,57	3,66
5	Kab. Tulungagung	4,43	4,50
6	Kab. Blitar	3,51	3,60
7	Kab. Kediri	3,85	3,93
8	Kab. Malang	4,24	4,32
9	Kab. Lumajang	3,65	3,74
10	Kab. Jember	3,83	3,92
11	Kab. Banyuwangi	4,24	4,31
12	Kab. Bondowoso	4,25	4,32
13	Kab. Situbondo	4,33	4,41
14	Kab. Probolinggo	3,32	3,42
15	Kab. Pasuruan	3,15	3,26
16	Kab. Sidoarjo	5,21	5,26
17	Kab. Mojokerto	4,17	4,25
18	Kab. Jombang	4,46	4,53
19	Kab. Nganjuk	4,29	4,36
20	Kab. Madiun	4,45	4,52
21	Kab. Magetan	4,52	4,59
22	Kab. Ngawi	4,50	4,57
23	Kab. Bojonegoro	4,48	4,55
24	Kab. Tuban	4,24	4,32
25	Kab. Lamongan	4,46	4,53
26	Kab. Gresik	4,82	4,88
27	Kab. Bangkalan	3,17	3,28
28	Kab. Sampang	2,77	2,89
29	Kab. Pamekasan	3,6	3,69
30	Kab. Sumenep	3,44	3,54
31	Kota Kediri	6,56	6,59
32	Kota Blitar	6,44	6,47
33	Kota Malang	6,64	6,67
34	Kota Probolinggo	6,19	6,22
35	Kota Pasuruan	6,16	6,20
36	Kota Mojokerto	6,81	6,83
37	Kota Madiun	6,81	6,83
38	Kota Surabaya	6,79	6,82
39	Kota Batu	5,54	5,58

Nilai Indeks Akses Keuangan Daerah